

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa keanggotaan tim Nasional dan tim daerah percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Apabila bangsa Indonesia benar-benar ingin melakukan percepatan dalam penanggulangan kemiskinan, pertama yang harus dilakukan adalah memahami apa yang dimaksud dengan kemiskinan dan penyebabnya. Agar usaha penanggulangan kemiskinan berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dirancang kebijakan yang tepat dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, antara lain: pejabat pemerintah, anggota parlemen, Organisasi Non Pemerintah (termasuk LSM, Ormas, lembaga-lembaga sosial dan keagamaan, partai politik), masyarakat madani, pihak swasta dan masyarakat miskin utamanya.

Keseriusan pemerintah, termasuk pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari program kebijakan yang dibuat, pelaksanaan program yang tepat sasaran, dan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai upaya penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Aspek penting lainnya adalah bagaimana mengembangkan indikator-indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan telah mencapai tujuan dan sasaran. Setelah melakukan pemantauan dan evaluasi kita dapat memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan dan program agar proses dan hasil yang diperoleh semakin baik dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam rangka mencapai harapan tersebut, pembahasan secara terperinci mengenai kemiskinan dan penanggulangannya sangat penting dilakukan agar berbagai pihak dapat memahami dan dapat bersama-sama memerangi

kemiskinan. Sebagai upaya mewujudkannya, maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2026. Dokumen RPKD tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dan arahan serta masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan jangka pendek atau tahunan. Tentang bagaimana merancang suatu kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada orang miskin, mengembangkan indikator keberhasilan program, melakukan pemantauan dan evaluasi.

Selain itu, bagi aktivis organisasi non pemerintah dan masyarakat, RPKD Provinsi NTB 2022-2026 diharapkan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kerjasama dalam menggalang upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan dokumen RPKD diharapkan semua pihak, terutama mereka yang bertanggungjawab dalam merancang dan menjalankan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan memiliki perhatian khusus dalam penanggulangan kemiskinan di daerah khususnya di tingkat *grass root* atau desa/kelurahan, sehingga memiliki pemahaman dan pengertian yang lebih baik (menyeluruh) tentang kemiskinan dan upaya penanggulangannya.

1.2 Maksud dan tujuan

Tujuan penyusunan dokumen **Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat** ini adalah sebagai panduan dan arah bagi setiap pemangku kepentingan dalam penyusunan/perumusan kebijakan dan pelaksanaan program yang strategis untuk mengentaskan kemiskinan di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dalam jangka segera, pendek, menengah dan jangka panjang.

Sedangkan sasarannya adalah munculnya koordinasi dan kerjasama yang efektif, sungguh-sungguh, konsisten dan berkesinambungan diantara para pemangku kepentingan termasuk aparat pemerintah di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga program-program penanggulangan kemiskinan di daerah ini dapat dilakukan secara terpadu, sistematis, terukur dan tepat sasaran.

1.3 Ruang lingkup

Ruang lingkup dokumen ini mencakup empat dimensi, yaitu diagnosis kemiskinan dengan memperhatikan suara masyarakat miskin, rencana aksi

yang memuat prioritas program, lokasi prioritas dan matriks prioritas program dan kegiatan yang didalamnya terdapat pembagian peran yang jelas antarpelaku baik pemerintah atasan, pemerintah kota, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga keuangan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan (RPKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2026 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;

1.4 Sistematika

Dokumen ini terdiri dari 6 (enam) bab yang meliputi:

- Bab 1** : menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar hukum dan sistematika
- Bab 2** : menjelaskan kondisi umum daerah menggambarkan tentang kondisi perekonomian, geografi, demograsi, pemerintahan, sosial budaya, dan hal lain yang terkait
- Bab 3** : menjelaskan profil kemiskinan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup analisis posisi relatif, analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi
- Bab 4** : menjelaskan tentang prioritas program mencakup identifikasi prioritas intervensi, analisis keterkaitan (*causal attribution*), analisis fiskal daerah, analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi
- Bab 5** : menjelaskan tentang lokasi prioritas mencakup identifikasi prioritas wilayah, menentukan modus intervensi dan matriks prioritas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
- Bab** : P e n u t u p

BAB.II.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km² terdiri dari daratan seluas 18.572,32 km² (40,81%) dan perairan laut seluas 29.187,71 km² (59,19%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Lombok seluas 4.699,83 km² (23,35%) dan Pulau Sumbawa seluas 15.424,65 km² (76,65%) yang dikelilingi oleh 415 pulau-pulau kecil (Tabel 2-1). Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°05' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah: sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Lombok & Provinsi Bali, dan sebelah timur Selat Sape & Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel.2.1. Luas Wilayah Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Persentase	Jumlah Pulau
Lombok Barat	896,56	4,83	125
Lombok Tengah	1.095,03	5,90	26
Lombok Timur	1.230,76	6,63	39
Lombok Utara	776,25	4,18	3
Mataram	61,30	0,33	-
Sumbawa Barat	1.849,02	9,96	16
Sumbawa	6.643,98	35,77	65
Dompu	2.391,54	12,88	21
Bima	3.405,63	18,34	120
Kota Bima	222,25	1,20	-
NTB	18.572,32	100,00	415

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Secara Administratif Provinsi NTB terdiri atas 8 kabupaten dan 2 kota dengan 117 kecamatan dan 1.152 desa/kelurahan. Jumlah kecamatan, desa/kelurahan dan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel.2.2. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM ²)
1	Kabupaten Lombok Barat	10	122	1.053,87
2	Kabupaten Lombok Utara	5	43	809,53
3	Kabupaten Lombok Tengah	12	139	1.169,58
4	Kabupaten Lombok Timur	21	254	1.605,55
5	Kabupaten Sumbawa	24	165	6.643,98
6	Kabupaten Dompu	8	81	2.320,00
7	Kabupaten Bima	18	192	4.389,40
8	Kabupaten Sumbawa Barat	8	65	1.849,02
9	Kota Mataram	6	50	61,30
10	Kota Bima	5	41	222,25
	Jumlah	117	1.152	20.124,48

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

- Topografi

Topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0 – 3.726 mdpl untuk Pulau Lombok dan 0 – 2.755 mdpl untuk Pulau Sumbawa, dengan klasifikasi ketinggian wilayah 0 - 100 mdpl sekitar 23,76% (seluas 478.911 Ha), ketinggian 100 - 500 mdpl sekitar 37,39% (seluas 753.612 Ha), ketinggian 500 - 1000 mdpl sekitar 15,25% (seluas 307.259 Ha) dan lebih dari 1000 mdpl 23,60% (seluas 475.533 Ha).

- Geologi

Geologi wilayah Provinsi NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resent). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuartar. Batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan.

- Hidrologi

Sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai di satuan wilayah sungai Lombok dan satuan wilayah sungai Sumbawa dibagi menjadi 18 sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai (SSWS/DAS) berdasarkan SK Gubernur

NTB No. 147 Tahun 1999. Satuan wilayah sungai (SWS) Lombok terdiri dari 4 (empat) SSWS meliputi: Dodokan, Menanga, Putih dan Jelateng. Sedangkan SWS Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas) SSWS meliputi Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, P, Moyo, Empang, Hoddo, Banggo, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh.

Inventarisasi cekungan air tanah di Provinsi NTB sebagaimana dilihat pada tabel dibawah.

Tabel.2.3. Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

No	Cekungan Air	Luas (Km ²)	Air Tanah Bebas(Juta M ³ /Tahun)	Air Tanah Tertekan (Juta M ³ /Tahun)
1	Mataram – Selong	2.366	662	8
2	Tanjung – Sambelia	1.124	224	22
3	Sumbawa Besar	1.404	183	25
4	Empang	345	35	3
5	Pekat	977	220	10
6	Sanggar – Kilo	1.419	320	14
7	Dompu	375	63	6
8	Bima	1,102	165	16
9	Tawali – Sape	363	36	3

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2022

- **Klimatologi**

Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada tahun 2017 temperatur udara maksimum di Provinsi NTB berkisar 33,2°C – 33,6°C, temperatur udara minimum 17°C – 21,4°C dan temperatur rata-rata 26,9°C–27,6°C. Kelembaban udara rata-rata 78%-85%, kelembaban udara minimum 57% - 64% dan kelembaban udara maksimum 94% - 96%. Kecepatan angin rata-rata 3-5 knots, tekanan udara antara 1003,1 – 1009,8 mb, lamanya penyinaran matahari 69% - 79% dan curah hujan berkisar antara 1.775 mm – 2.874 mm.

Curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 1 mm dan tertinggi pada bulan Desember sebesar 398 mm. Sementara, hari hujan terendah terjadi pada bulan Juli dan Oktober sebanyak 1 hari dan tertinggi di bulan Desember sebanyak 25 hari. Lama penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 61% sedangkan tertinggi terjadi pada bulan

Oktober sebesar 93%. Rata-rata kecepatan angin setiap bulan berkisar antara 3 sampai 5 knots. Rata-rata kecepatan angin terendah terjadi di bulan Februari dan Desember serta tertinggi pada bulan Agustus, September, dan Oktober.

- Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Rawan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.2.4. Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Rawan Tanah Longsor Tipe A	
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan
Kab. Lombok Timur	Kawasan sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan sekitar Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluk dan Punik
Kab. Sumbawa	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar dan Empang
Kab. Dompu	Kawasan Sekitar Tambora, Ranggo dan Paradowane
Kab dan Kota Bima	Kawasan sekitar Tambora Bagian timur, Bima dan Karumbu
Rawan Tanah Longsor Tipe B	
Kab. Lombok Barat	Kawasan Sekitar Rinjani, Malimbu, Lembar dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan dan sekitar Kuta
Kab. Lombok Timur	Kawasan Sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Dompu	Kawasan sekitar Tambora bagian barat
Kab. Bima	Kawasan sekitar Tambora bagian timur dan sekitar Gunung Kuta

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2022

Berikut ini lokasi rawan bencana gunung berapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel.2.5. Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi

Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
Gunung Rinjani	
Kab. Lombok Utara	Daerah Bahaya: Kecamatan Bayan dan Kampung Batusantek (sepanjang alur sungai Kokok Putih)
Kab. Lombok Timur	Daerah Bahaya: Kecamatan Aikmel, Sambelia, dan sepanjang alur Kokok Putih
Gunung Tambora	
Kab. Dompu	Daerah Bahaya: Daerah di sekitar kaldera dengan luas kurang lebih 58,7 km ²

Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
Kota Bima	Daerah Waspada: jalur sepanjang sungai Ngguwu kara, sungai Ngguwu Tula (ketiganya termasuk Desa Beringin Jaya) dan Sungai Hodo (Desa Kesi)
Kab. Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Oi Marai dan sungai Mango (Desa Kawinda Toi), sungai Panihi (Desa Kawinda Nae), dan sungai Sumba (Desa Labuhan Kenanga)
Gunung Api Sangiang	
Kab. Bima	Daerah terlarang : daerah yang termasuk dalam lingkaran dengan jari-jari kurang lebih 5,0 Km ² yang berpusat di Puncak Doro Api yang diperluas sepanjang alur sungai kering Oi Sola, Oi sori Buntu, Sori Belanda, Sori Mbere, Sori Do Japa, Sosi Panda, Sori Iso dan Sori Berano
	Daerah Bahaya I : hampir seluruh daratan pulau Sangiang termasuk dalam daerah ini, kecuali kampung Toro Panda yang berada di bagian selatan
	Daerah Bahaya II : daerah di sekeliling pantai pulau Sangiang

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2022

Berikut ini lokasi rawan bencana Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel.2.6. Lokasi Kawasan Rawan Tsunami

Lokasi	Kawasan Rawan Tsunami
Kab. Lombok Barat	Kawasan Pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah	Kawasan pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang
Kab. Lombok Timur	Kawasan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejongong dan Sekongkang
Kab. Sumbawa	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Kawasan pesisir bagian timur dan selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2022

Berikut ini lokasi rawan bencana angin topan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel.2.7. Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan

Lokasi	Kawasan Rawan Angin Topan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Lombok Timur	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Sumbawa Barat	Kecamatan Brang Rea dsk
Kab. Sumbawa	Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk
Kab. Dompu	Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Dompu
Kab. Bima	Kecamatan Woha dsk, monta dsk, Woja dsk

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2022

Berikut ini lokasi rawan bencana gelombang pasang di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-8 Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Lokasi	Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kota Mataram	Sepanjang pesisir bagaian barat yaitu Sekip dan Ampenan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Sepanjang Pesisir Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara
Kab. Lombok Tengah	Pantai bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta Tanjung Aan, Gerupuk dan Pantai Awang
Kab. Lombok Timur	Pantai selatan dan timur Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji, Labuhan Lombok
Kab. Sumbawa Barat	Pantai bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejong dan Sekongkang
Kab. Sumbawa	Pantai bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Pantai bagian barat Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Pantai bagian utara dan timur Kabupaten Bima, yakni Donggo dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2022

Berikut ini lokasi rawan bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-9 Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Kekeringan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar, Sekotong dan sekitarnya, Kedondong, Malimbu, Pemenang dan sekitarnya, Tanjung, Liuk-Kayangan-Selengen-Bayan, dan Medas
Kab. Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya
Kab. Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur, Labuhan Haji, Pringgabaya, Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
Kab. Sumbawa Barat	Sejorong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong Taliwang-Tepas-Seteluk-Labuhan Sepakeh
Kab. Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batu Lanteh-Baturotok Punik, Alas-Penyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat, Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-Lopok-Lape-kalaning-Tanjungberu Pungkit, Plampang-Empang
Kab. Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo dan Mbawi
Kab. dan Kota Bima	Sila, Paradowane, Bima dan Sekitarnya, Tawali, Sape, dan P.Sangiang

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2022

Lokasi rawan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tersebar di wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yaitu daerah/kawasan yang berpotensi dan/atau yang pernah mengalami gempa skala VII s.d XII MMI (*modified mercally intensity*).

Untuk bencana yang timbul akibat kesalahan manusia, teridentifikasi kawasan rawan banjir sebagai berikut.

Tabel.2.10. Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Bencana Akibat Kesalahan Manusia
Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung dan Jembatan Kembar
Kab. Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Bencana Akibat Kesalahan Manusia
Kab. Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai
Kab. Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke-Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2022

Daya dukung air dapat dihitung menggunakan metode jasa ekosistem. Angka persentase yang ditampilkan dari hasil perhitungan jasa ekosistem adalah persentase lahan yang potensial dalam menghasilkan air. Kelas tinggi sedang dan rendah menunjukkan penyediaan air di Provinsi NTB.

Untuk menggambarkan status kemampuan daya dukung air pada Provinsi NTB, jumlah ketersediaan air pada provinsi NTB selanjutnya dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Sehingga akan menghasilkan besaran selisih penyediaan (melampaui/belum melampaui) daya tampung.

Tabel.2.11. Status Penyediaan Air Provinsi NTB

Ketersediaan (m ³)	Kebutuhan (m ³)			Selisih (m ³)	Status Ketersediaan
	Domestik	Lahan	Total		
4.735.817.287	190.426.032	8.204.726.871	8.395.152.903	3.659.335.615	Terlampaui

Sumber: Bappeda Prov. NTB. 2021

Kebutuhan total air di Provinsi NTB sebesar 8.395.152.903 m³ sedangkan ketersediaan air sebanyak 4.735.817.287 m³ sehingga sudah berhasil melampaui kebutuhan dengan jumlah selisih 3.659.335.615 m³.

2.1.1.2. Demografi NTB

Perkembangan penduduk Provinsi NTB terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk NTB tahun 2020-2021 cenderung meningkat disebabkan oleh kelahiran alamiah dan migrasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi NTB tahun 2020 sebanyak 5.320.092 jiwa, terdiri atas laki-laki 2.656.208 jiwa (49,93%) dan perempuan 2.663.884 jiwa (50,07%).

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilaksanakan BPS Provinsi NTB Tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yakni , hal ini disebabkan adanya perubahan perhitungan menggunakan variabel baru yang bersumber data administrasi kependudukan.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk NTB tahun 2020 – 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel.2.12. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi NTB Tahun 2020-2021

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Ribu)		Laju Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2020	2021
1	Lombok Barat	721,4	731,8	1,80	1,91
2	Lombok Tengah	1.034,9	1.049,7	1,80	1,92
3	Lombok Timur	1.325,2	1.343,9	1,77	1,88
4	Lombok Utara	247,4	251,5	2,08	2,19
5	Mataram	429,7	432,0	0,63	0,74
Pulau Lombok		3.758,6	3.808,9	1,62	1,73
6	Sumbawa Barat	145,8	148,5	2,33	2,44
7	Sumbawa	509,8	517,8	1,99	2,10
8	Dompu	236,7	238,2	0,75	0,87
9	Bima	514,1	520,4	1,53	1,65
10	Kota Bima	155,1	156,2	1,82	1,93
Pulau Sumbawa		1.561,5	1.581,1	1,68	1,80
Jumlah		5.320,0	5.390,0	1,63	1,76

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Persebaran penduduk di Provinsi NTB belum merata, persentase penduduk yang tinggal di Pulau Lombok mencapai 70,65% sementara di Pulau Sumbawa sebesar 29,35%. Ketimpangan distribusi penduduk berdampak pada munculnya masalah menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti ketersediaan sumber air, kerusakan hutan dan lahan, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, pendangkalan sungai, dan lain-lain. Persebaran penduduk Provinsi NTB disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tidak meratanya distribusi penduduk antara kedua pulau tersebut di Provinsi NTB berimplikasi pada tingginya ketimpangan kepadatan penduduk di antara kedua pulau tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel.2.13. Kepadatan Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2019-2021

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)		
		2019	2020	2021
1	Lombok Barat	659.46	684.60	694
2	Lombok Tengah	810.11	884.81	898
3	Lombok Timur	747.79	825.41	837
4	Lombok Utara	272.27	305.61	311
5	Kota Mataram	7,939.89	7,008.99	7,048
	Pulau Lombok	755.39	799.74	
6	Sumbawa Barat	80.37	78.85	80
7	Sumbawa	68.89	76.72	78
8	Dompu	108.74	102.01	103
9	Bima	111.31	117.12	119
10	Kota Bima	778.54	698.04	703
	Pulau Sumbawa	98.55	101.23	
	Provinsi NTB	251.95	264.36	255

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022 (diolah)

Merujuk pada tabel di atas, Pulau Lombok mempunyai tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi yakni delapan kali lipat dari Pulau Sumbawa yakni masing-masing sebesar 799,74 jiwa/km² dibandingkan 101,23 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Mataram yakni 7.008,99 jiwa/km² dan terendah adalah Kabupaten Sumbawa sebesar 76,72 jiwa/km².

Sex ratio merupakan perbandingan antaran jumlah penduduk laki dibanding jumlah penduduk perempuan. Sex ratio penduduk Provinsi NTB Tahun 2020 mencapai 99,71%. Besarnya sex ratio pada tahun 2019 adalah 94,36%, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Namun demikian, pertumbuhan penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perempuan meskipun secara keseluruhan cenderung menurun dari 1,17% tahun 2018 menjadi 1,13% di tahun 2019. Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pertumbuhannya secara rinci selama periode tahun 2016-2021.

Tabel.2.14. Jumlah Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2021

Thn	Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan (%)			Sex Ratio
	L	P	Jumlah	L	P	Jlh	
2016	2.375.750	2.520.412	4.896.162	1,28	1,23	1,25	94,26
	48,52%	51,48%	100%				
2017	2.405.080	2.550.498	4.955.578	1,23	1,19	1,21	94,3
	48,53%	51,47%	100%				
2018	2.433.731	2.579.956	5.013.687	1,19	1,16	1,18	94,33
	48,54%	51,46%	100%				
2019	2.461.652	2.608.733	5.070.385	1,15	1,12	1,14	94,36
	48,55%	51,45%	100%				
2020	2.656.208	2.663.884	5.320.092	7,90	2,11	10,02	99,71
	49,93%	50,07%	100%				
2021	2.695.552	2.694.446	5.390.998	1,48	1,15	1,31	100,00
	50,01%	49,99	100%				

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan pada kelompok umur diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) pada tahun 2021 sebanyak 3.626.598 orang atau sebesar 67,28% atau meningkat 1,34% dibandingkan tahun 2020. Sementara, kelompok umur tidak produktif sebesar 1.763.400 orang atau 32,72%. Penduduk perempuan usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki yaitu mencapai 50,28% sedangkan laki-laki sebesar 49,72%. Dengan demikian, jumlah penduduk laki-laki tidak produktif (50,29%) lebih tinggi dari penduduk perempuan (49,72%). Adapun rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 48,62 atau cenderung mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya sumber daya manusia yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk berdasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin serta rasio ketergantungan tahun 2017 – 2021.

Tabel.2.15. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021

TAHUN	JENIS KELAMIN	KELOMPOK UMUR (TAHUN)			Dependency Ratio
		0 - 14	15 - 64	65	
2017	Laki	749.138	1.540.900	115.042	56,08
	Perempuan	718.95	1.697.088	134.46	50,29
	Total	1.468.088	3.237.988	249.502	53,04
2018	Laki	751.919	1.563.026	118.786	55,71
	Perempuan	722.099	1.719.054	138.803	50,08

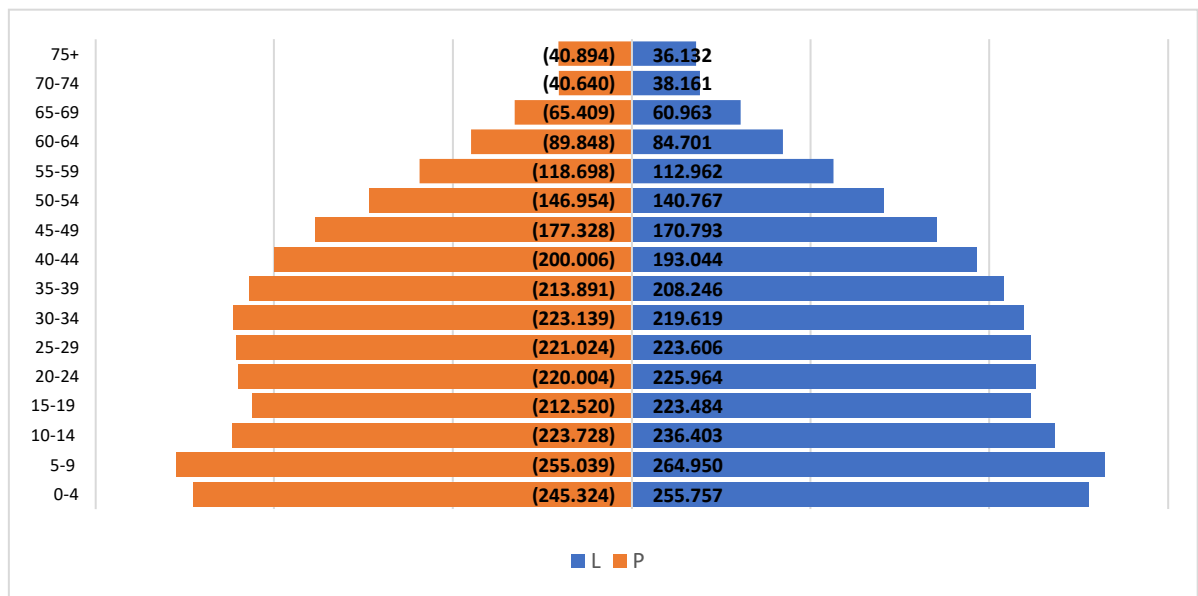
TAHUN	JENIS KELAMIN	KELOMPOK UMUR (TAHUN)			Dependency Ratio
		0 - 14	15 - 64	65	
	Total	1.474.018	3.282.080	257.589	52,76
2019	Laki	753.255	1.584.052	124.312	55,40
	Perempuan	723.150	1.741.351	144.265	49,81
	Total	1.476.405	3.325.403	268.577	52,47
2020	Laki	752.810	1.773.593	129.805	49,76
	Perempuan	719.174	1.805.088	139.622	47,58
	Total	1.471.984	3.578.681	269.427	48,66
2021	Laki	757.110	1.803.186	135.256	49,49
	Perempuan	724.091	1.823.412	146.943	47,77
	Total	1.481.201	3.626.598	282.199	48,62

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Pemerintah Provinsi NTB menghadapi tantangan terkait dengan bertambahnya jumlah penduduk, ketidakmerataan sebaran penduduk antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa, meningkatnya tingkat kepadatan dan semakin bertambahnya penduduk kelompok umur produktif. Situasi dan kondisi ini telah mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan komprehensif kaitannya dengan strategi pembangunan yang tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja melainkan juga memiliki daya ungkit dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat berkontribusi nyata bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) semakin berkurang. Berdasarkan struktur umur penduduk NTB 2021, kelompok umur produktif (15-64) lebih mendominasi. Struktur umur penduduk tersebut disajikan pada gambar berikut.

Gambar.2.1. Struktur Umur Penduduk NTB Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.1.2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Nusa Tenggara Barat secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Kinerja ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,30 persen dibandingkan tahun 2020. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,94 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 67,60 persen.

Selanjutnya, berdasarkan sumber laju pertumbuhan secara *year-on-year* triwulan IV- 2021 terhadap triwulan IV-2020 ekonomi Nusa Tenggara Barat juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,16 persen. Dimana dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,14 persen sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,72 persen.

Secara umum perekonomian Nusa Tenggara Barat mulai pulih setelah dua tahun secara nasional mengalami dampak pandemi Covid-19. Adapun struktur PDRB Nusa Tenggara Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan IV tahun 2021 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,95 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalan sebesar 18,69 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,82 persen; dan Konstruksi sebesar 10,76 persen. Sedangkan PDRB Nusa Tenggara Barat dari sisi pengeluaran Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 67,60 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,81 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,79 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 0,54 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 0,52 persen. Sementara itu, Komponen Impor LN yang menjadi pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran mengalami kontraksi sebesar 43,22 persen.

Kinerja ekonomi Nusa Tenggara Barat pada triwulan IV-2021 menunjukkan arah perbaikan terutama dari sisi lapangan usaha dan komponen pengeluaran yang memberikan andil terbesar dalam perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat, hal ini memberikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi selama tahun 2021 lebih baik dibanding tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat mengalami kontraksi sebesar 0,64 persen pada tahun 2020. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi mulai pada triwulan III-2020 sebesar 1,25 persen, dengan kontraksi terdalam terjadi pada kategori industri pengolahan sebesar 20,02 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontraksi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga

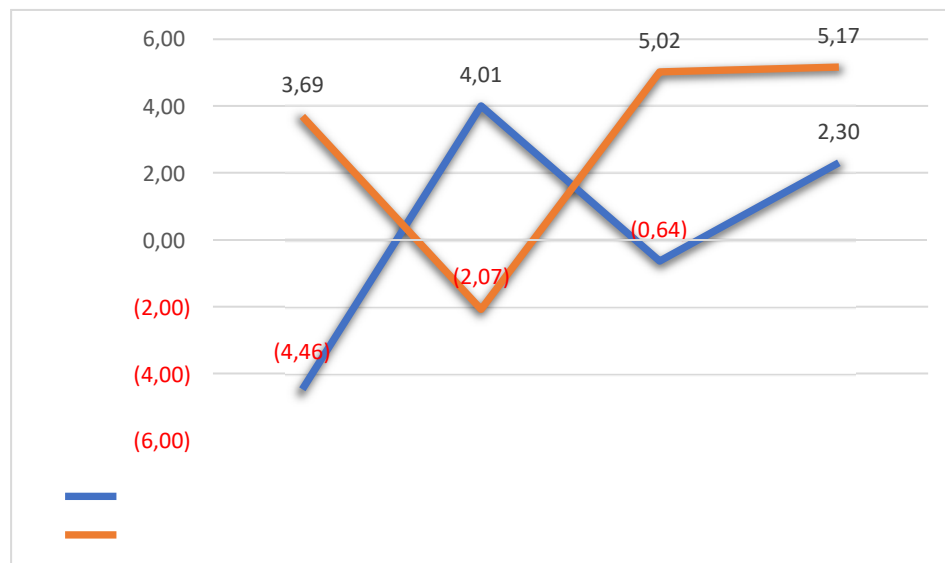
Non-Profit (PK-LNPRT) sebesar 0,96 persen, hal ini menyebabkan penurunan aktivitas produksi pada beberapa lapangan usaha.

Tabel.2.16. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2021

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,38	-0,41	1,14	22,92	23,18	22,80
2	Pertambangan dan Penggalian	0,18	27,66	-0,15	13,49	17,43	17,33
3	Industri Pengolahan	4,07	-2,41	2,10	4,12	4,04	4,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,01	8,87	7,73	0,08	0,08	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,64	4,19	0,49	0,08	0,08	0,08
6	Konstruksi	12,22	-14,26	8,94	10,56	9,09	9,75
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,37	-4,98	1,72	14,95	14,19	13,98
8	Transportasi dan Pergudangan	1,34	-31,36	2,14	7,28	4,96	4,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,03	-28,24	1,35	2,03	1,44	1,41
10	Informasi dan Komunikasi	4,12	12,38	4,98	1,96	2,20	2,21
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	11,12	4,39	3,65	4,03	4,24
12	Real Estate	4,76	1,04	1,47	3,26	3,28	3,19
13	Jasa Perusahaan	5,01	-3,44	0,33	0,18	0,18	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,63	2,92	1,74	6,17	6,57	6,49
15	Jasa Pendidikan	7,04	0,82	1,67	5,05	5,16	5,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,11	-2,38	7,87	2,02	2,01	2,09
17	Jasa Lainnya	5,47	-6,20	1,65	2,19	2,09	2,06
	PDRB dengan Tambang	3,90	-0,62	2,30	100,00	100,00	100,00
	PDRB tanpa Tambang						

Sumber : BPS NTB, 2022

Gambar.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2021 (persen)

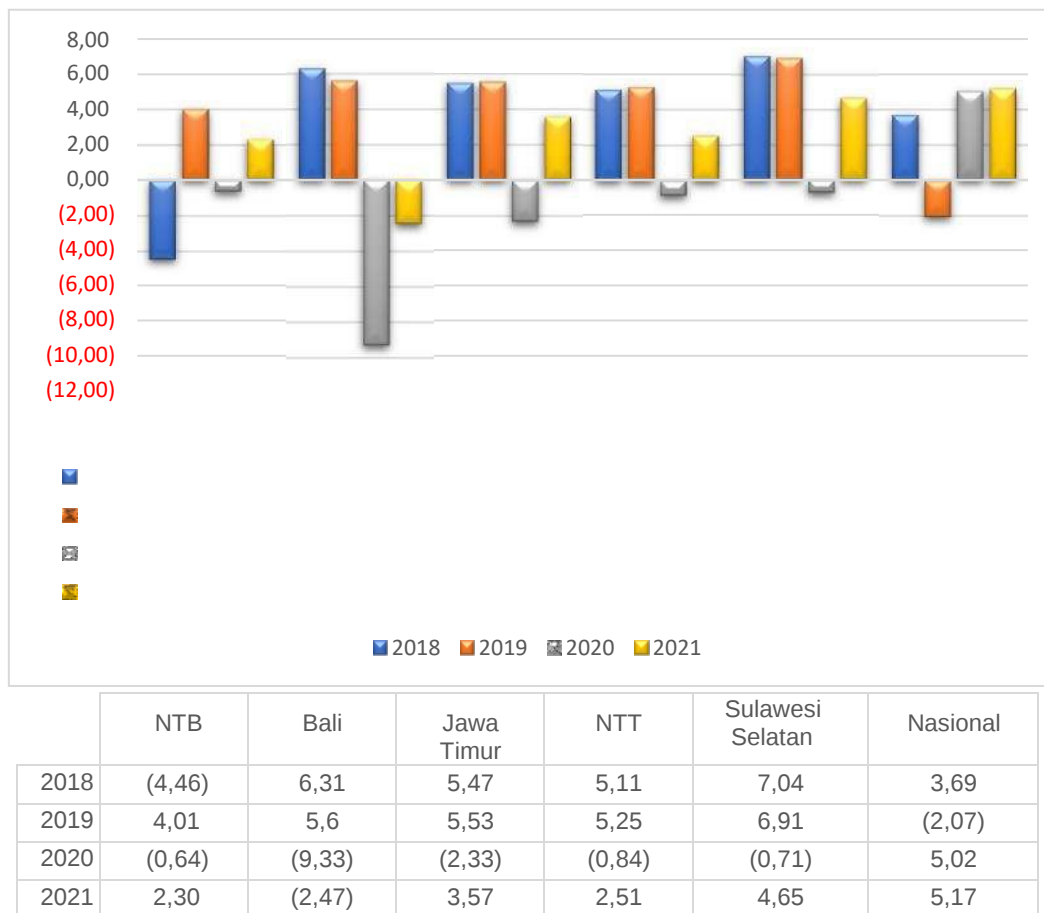


	2018	2019	2020	2021
NTB	(4,46)	4,01	(0,64)	2,30
Nasional	3,69	(2,07)	5,02	5,17

Sumber : BPS NTB, 2022. Diolah Bappeda Provinsi NTB, 2022

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan yang lebih baik dari nasional, walaupun angka pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat secara nasional belum tercapai. Selanjutnya perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat dibandingkan dengan Provinsi sekitar seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat termasuk dalam kelompok sudah memenuhi target dalam RKP dimana Provinsi sekitarnya tersebut masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target). Adapun Bali pada tahun 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,47 persen selanjutnya Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57 persen, Nusa Tenggara Timur dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,51 persen dan Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,65 persen serta semua Provinsi sekitar yang menjadi perbandingan dari laju pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami deviasi dari nilai target RKP yaitu dibawah 5 persen. Adapun perbandingan laju pertumbuhan dengan provinsi sekitar bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar.2.3. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Sekitar dan Nasional Tahun 2018 – 2021 (persen)



Sumber : simreg.bappenas.go.id, 2022. Data diolah Bappeda Provinsi NTB, 2022

Selanjutnya perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2021 mencapai Rp140,15 triliun sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp95,44 triliun, ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat dibandingkan tahun 2020 dengan ADHB sebesar Rp133,61 triliun dan berdasarkan ADHK 2010 mencapai Rp93,288 triliun merupakan refleksi capaian yang diperoleh dalam pembangunan dimana nilai tambah barang dan jasa meningkat pada tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.

Tabel.2.17. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2019-2021

No	Sektor Ekonomi	Atas Dasar Harga Berlaku (ADH)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
		2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	30.368,89	30.976,8	31.960,4	21.569,97	21.466,1	21.711,2
2	Pertambangan dan Penggalian	17.995,65	23.288,9	24.283,2	13.121,22	16.606,1	16.580,7
3	Industri Pengolahan	5.442,72	5.393,7	5.604,5	4.441,24	4.351,6	4.442,9
4	Pengadaan Listrik dan Gas	106,27	112,9	120,4	88,00	95,8	103,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	105,46	111,8	114,0	72,32	76,0	76,4
6	Konstruksi	13.986,70	12.142,2	13.667,3	10.408,06	8.925,5	9.723,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.795,66	18.962,3	19.596,8	13.583,10	12.908,9	13.131,5
8	Transportasi dan Pergudangan	9.650,36	6.625,9	6.998,2	6.594,80	4.526,6	4.623,5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2686,8	1.924,6	1.973,0	1.580,49	1.130,0	1.145,2
10	Informasi dan Komunikasi	2.598,25	2.934,4	3.099,0	2.368,19	2.655,5	2.787,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.840,13	5.389,1	5.943,6	3.319,08	3.688,0	3.849,8
12	Real Estate	4.363,71	4.381,1	4.464,7	2.936,50	2.962,6	3.006,3
13	Jasa Perusahaan	245,13	239,4	240,3	173,88	167,7	168,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.174,65	8.772,8	9.096,0	4.859,12	5.001,0	5.088,0
15	Jasa Pendidikan	6.700,49	6.888,9	7.168,6	4.574,89	4.609,5	4.686,4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.685,38	2.679,4	2.932,4	2.096,05	2.041,6	2.202,1
17	Jasa Lainnya	2.918,13	2.789,4	2.890,8	2.227,81	2.076,4	2.110,6
	PDRB dengan Tambang	132.674,15	133.613,7	140.153,3	94.014,74	93.288,9	95.436,8
	PDRB tanpa Tambang	114.678,49			80.893,52		

Sumber : BPS NTB, 2022

*: Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Pada sisi pengeluaran terjadi pertumbuhan pada tahun 2021 berdasarkan PDRB atas dasar berlaku dan harga konstan 2010. Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 67,60

persen, selanjutnya Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 3,81 persen dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,79 persen. dimana ada salah satu komponen yang mengalami kontraksi sangat tinggi melebihi tahun 2020 adalah pada komponen Impor Luar Negeri sebesar -43,22 persen pada tahun 2021. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini dalam miliar rupiah.

Tabel 2- 18 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah) Tahun 2019-2021

No	Komponen	Atas Dasar Harga Berlaku (ADH)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010		
		2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	83.915,7	82.080,7	85.129,0	58.442,8	56.729,8	57.746,6
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.201,7	2.178,7	2.230,8	1.513,8	1.488,1	1.496,1
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20.238,8	20.758,3	21.226,6	12.366,5	12.509,3	12.574,5
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	51.936,9	49.488,7	53.023,0	32.163,9	30.386,4	31.543,4
5	Perubahan Inventori	813,0	824,3	321,0	299,3	296,8	113,1
6	Ekspor LN	5.890,2	8.899,8	16.593,8	3.865,4	5.577,5	9.348,1
7	Impor LN	4.325,9	4.106,2	2.298,9	2.608,5	2.456,0	1.394,5
8	Net Ekspor AD	-28.170,3	-26.510,6	-36.071,9	-12.170,7	-11.243,1	-15.990,6
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	132.500,1	133.613,7	140.153,3	93.872,4	93.288,9	95.436,8

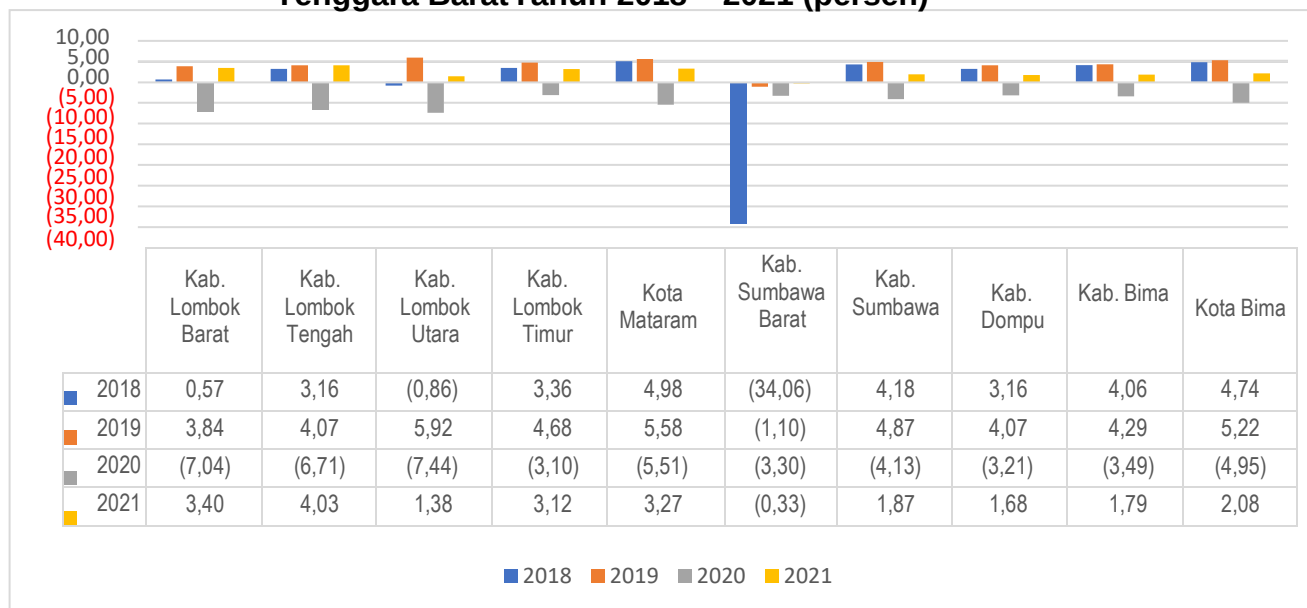
Sumber : BPS NTB, 2022

*: Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Secara spasial struktur perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat terbentuk oleh sepuluh (10) Kabupaten/kota, dimana pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat sebesar 2,30 persen. Adapun Kabupaten/kota yang mengalami kontraksi pada tahun 2021 adalah Kabupaten Sumbawa Barat dengan kontraksi sebesar 0,33 persen. selanjutnya Kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi adalah pada Kabupaten Lombok Barat dengan laju pertumbuhan sebesar 3,40 persen. Adapun laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar.2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2021 (persen)



Sumber : NTB dalam angka, 2022. Data diolah Bappeda NTB, 2022

2.1.2.2. Laju Inflasi

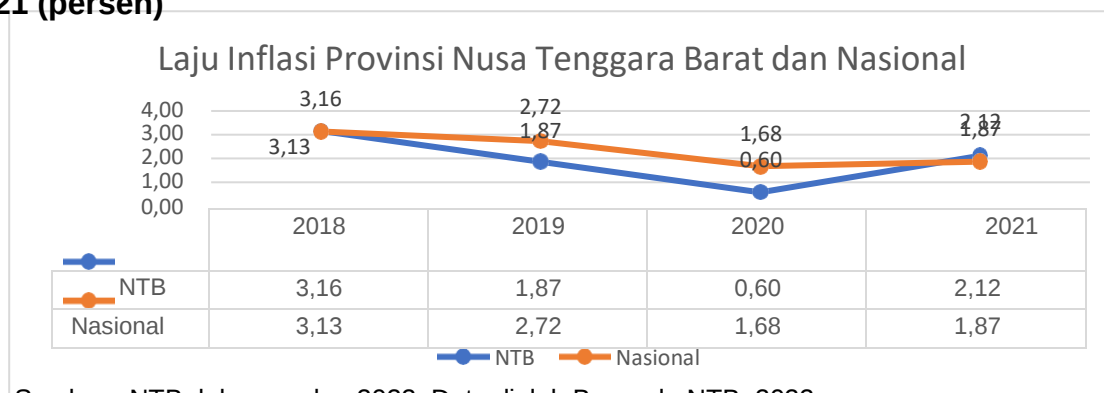
Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Andil Inflasi merupakan besarnya sumbangan setiap komoditas yang mengalami fluktuasi harga terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi di suatu kota atau secara nasional. Besarnya nilai perubahan indeks (inflasi/deflasi) yang terjadi setiap bulan, merupakan gabungan andil dari jenis barang/jasa yang mengalami fluktuasi harga pada bulan yang bersangkutan.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup

dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah.

Inflasi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Laju inflasi Gabungan Dua Kota tahun kalender Desember 2021 sebesar 2,12 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Desember 2020 sebesar 0,60 persen. Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Desember 2021 sebesar 2,12 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Desember 2020 sebesar 0,60 persen. Selanjutnya laju inflasi tahun 2021 ini lebih tinggi dengan realisasi inflasi Nasional sebesar 1,87 persen.

Gambar.2.5. Laju Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2021 (persen)



Sumber : NTB dalam angka, 2022. Data diolah Bappeda NTB, 2022

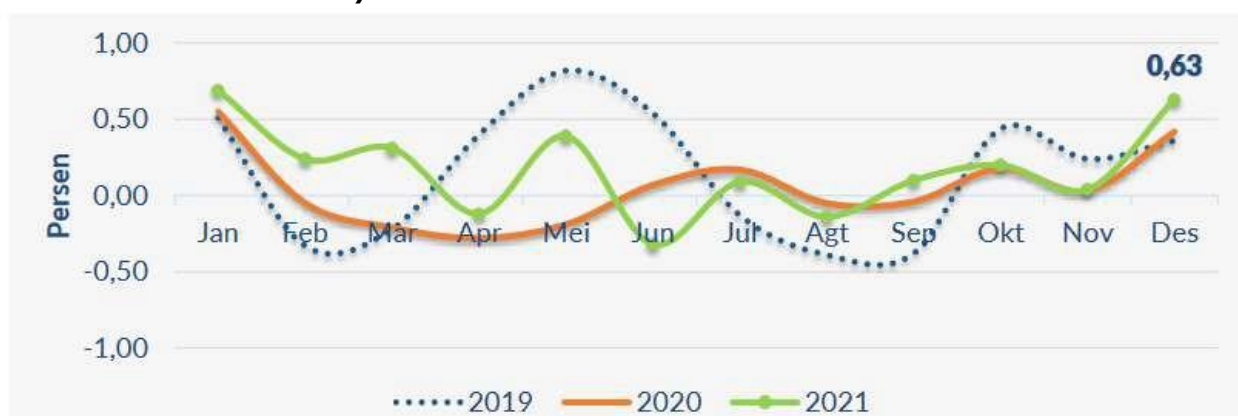
Berdasarkan hasil pemantauan, perkembangan harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan peningkatan. Pada Bulan Desember 2021, inflasi Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 0,63 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,31 pada bulan November 2021 menjadi 105,97 pada bulan Desember 2021. Dengan angka inflasi tersebut, maka laju inflasi Gabungan tahun kalender (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar

2,12 persen dan laju inflasi tahun ke tahun' (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,12 persen.

Inflasi Gabungan Dua Kota Bulan Desember 2021 sebesar 0,66 persen terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,38 persen; Kelompok Transportasi sebesar 1,11 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,22 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,18 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,18 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,14 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,11 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,10 persen; dan Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,18 persen dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,01 persen.

Lima komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi di bulan Desember 2021 ini antara lain Cabai Rawit, Tomat, Angkutan Udara, Minyak Goreng, dan Tongkol Diawetkan. Sedangkan lima komoditas yang mengalami penurunan harga terbesar antara lain Daging Ayam Ras, Ikan Bandeng/Ikan Bolu, Bawang Merah, Ikan Ekor Kuning, dan Daun Kelor.

Gambar.2.6. Inflasi Bulanan Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) Tahun 2019–2021



Sumber : NTB dalam angka, 2022

Pada bulan Desember 2021 kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi adalah Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,4401 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,1246 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,0375 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,0121 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,0105 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan

Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,0084 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,0076 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,0015 persen; dan Kelompok Pendidikan sebesar 0,0000 persen. Sedangkan kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi adalah Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,0050 persen dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,0001 persen

2.1.2.3. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2021 tercatat sebesar 735,30 ribu orang (13,83 persen). Nilai ini lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2021, dimana jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 746,66 ribu orang (14,14 persen). Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode Maret 2021 – September 2021 yaitu sebesar 0,31 persen poin. Selain itu, nilai ini juga lebih rendah dibandingkan dengan September 2020 yang tercatat sebesar 746,04 ribu orang (14,23 persen).

Sejak Maret 2012 sampai September 2021 persentase penduduk miskin lebih sering mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin terendah adalah pada September 2019 yaitu sebesar 705,68 ribu orang. Sedangkan persentase penduduk miskin yang terendah selama periode tersebut adalah pada September 2021 yaitu sebesar 13,83 persen.

**Tabel.2.19. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB
Tahun 2012 – September 2021**

Bulan	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Perubahan
Maret	2012	862,52	18,63	-1,1 poin
September		840,11	18,02	-0,61 poin
Maret	2013	843,66	17,97	0,05 poin
September		815,50	17,25	-0,72 poin
Maret	2014	820,82	17,24	-0,01 poin
September		816,62	17,05	-0,19 poin
Maret	2015	823,89	17,1	-0,05 poin
September		802,29	16,54	-0,56 poin
Maret	2016	804,45	16,48	-0,06 poin
September		786,58	16,02	-0,46 poin
Maret	2017	793,78	16,07	0,05 poin
September		748,12	15,05	-1,02 poin
Maret	2018	737,46	14,75	-0,3 poin
September		735,62	14,63	-0,12 poin
Maret	2019	735,96	14,56	-0,07 poin
September		705,68	13,88	-0,68 poin
Maret	2020	713,89	13,97	0,09 poin
September		746,04	14,23	0,26 poin
Maret	2021	746,66	14,14	-0,09 poin
September		735,30	13,83	-0,31 poin

Sumber : BPS NTB, diolah dari data suspenas, 2022

Memperhatikan Tabel tersebut di atas, perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung mengalami penurunan. Namun kalau diamati setiap periode, penurunan penduduk miskin bersifat fluktuatif dan poin penurunannya bervariasi. Perkembangan tingkat kemiskinan bulan maret 2021 sampai dengan September 2021 dijelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada bulan Maret 2021 sebesar 746,66 ribu orang, sedangkan pada September 2021 sebesar 735,30 atau berkurang sekitar 11.40 ribu orang. Adapun persentase penduduk miskin pada periode Maret 2021 – September 2021 mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dari 14,14 persen menjadi 13,83 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 sebesar 14,92 persen, turun 0,38 persen poin menjadi 14,54 persen pada September 2021.

Sejalan dengan perkotaan, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 13,37 persen pada Maret 2021 menjadi 13,12 persen pada September 2021.

Selanjutnya, untuk garis kemiskinan Nusa Tenggara Barat selama Maret 2021–September 2021, Garis Kemiskinan mengalami kenaikan 4,30 persen, yaitu dari Rp 423.505,- per kapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp 441.711,- per kapita per bulan pada September 2021. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2021 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,42 persen.

Tabel.2.20. Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bulan Maret 2021 dan September 2021

Daerah	Bulan	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
			Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan	Maret	2021	325.304	109.147	434.451
	September		336.346	116.509	452.855
	Perubahan Maret s.d September (%)		3,39	6,75	4,24
Perdesaan	Maret		311.567	101.079	412.646
	September		320.916	109.465	430.381
	Perubahan Maret s.d September (%)		3,00	8,30	4,30
Perkotaan dan Perdesaan	Maret		318.425	105.080	423.505
	September		328.699	113.012	441.711
	Perubahan Maret s.d September (%)		3,23	7,55	4,3

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 dan September 2021

Pada September 2021, lima komoditas makanan yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan di daerah perkotaan secara berurutan dengan share masing- masing komoditas adalah beras 18,96 persen; rokok kretek filter 11,55

persen; daging ayam ras 3,71 persen; telur ayam ras 3,18 persen; dan kue basah 2,70 persen. Pada daerah perdesaan, lima komoditas makanan yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan September 2021 secara berurutan dengan share masing-masing komoditas adalah beras 20,72 persen; rokok kretek filter 12,04 persen; telur ayam ras 2,98 persen; daging ayam ras 2,94 persen; dan kue basah 2,63 persen.

Untuk komoditas non makanan, lima komoditas yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan di daerah perkotaan secara berurutan dengan share masing-masing komoditas adalah perumahan 9,61 persen; bensin 2,65 persen; pendidikan 2,00 persen; listrik 1,41 persen; dan perlengkapan mandi 1,36 persen. Pada daerah perdesaan, lima komoditas non makanan yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan September 2021 secara berurutan dengan share masing-masing komoditas adalah perumahan 11,02 persen; bensin 1,95 persen; pendidikan 1,40 persen; perlengkapan mandi 1,27 persen; dan listrik 1,21 persen.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel.2.21. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Menurut Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Maret 2021 dan September 2021

Tahun 2021	Kota	Desa	Kota dan Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret	2,351	2,129	2,239
September	2,433	2,573	2,503
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)			
Maret	0,511	0,471	0,491
September	0,537	0,719	0,628

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2021 dan September 2022

Pada periode Maret 2021 – September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 2,239 pada Maret 2021 menjadi 2,503 pada September 2021. Peningkatan nilai indeks ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi Garis Kemiskinan. Demikian juga, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dari 0,491 pada Maret 2021 menjadi 0,628 pada September 2021. Ini berarti ketimpangan pengeluaran diantarpengeluaran penduduk miskin semakin melebar.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan. Di daerah perkotaan, P1 meningkat sebesar 3,48 persen, yaitu dari 2,351 pada Maret 2021 menjadi 2,433 pada September 2021. Di daerah perdesaan, P1 juga mengalami peningkatan dari 2,129 pada Maret 2021 menjadi 2,573 pada September 2021, atau meningkat 20,87 persen.

Untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Di daerah perkotaan, P2 Maret 2021 sebesar 0,511 menjadi 0,537 pada September 2021, atau meningkat 0,026 poin. Sedangkan di daerah perdesaan, P2 juga mengalami peningkatan dari 0,471 pada Maret 2021 menjadi 0,719 pada September 2021, atau meningkat 0,248 poin.

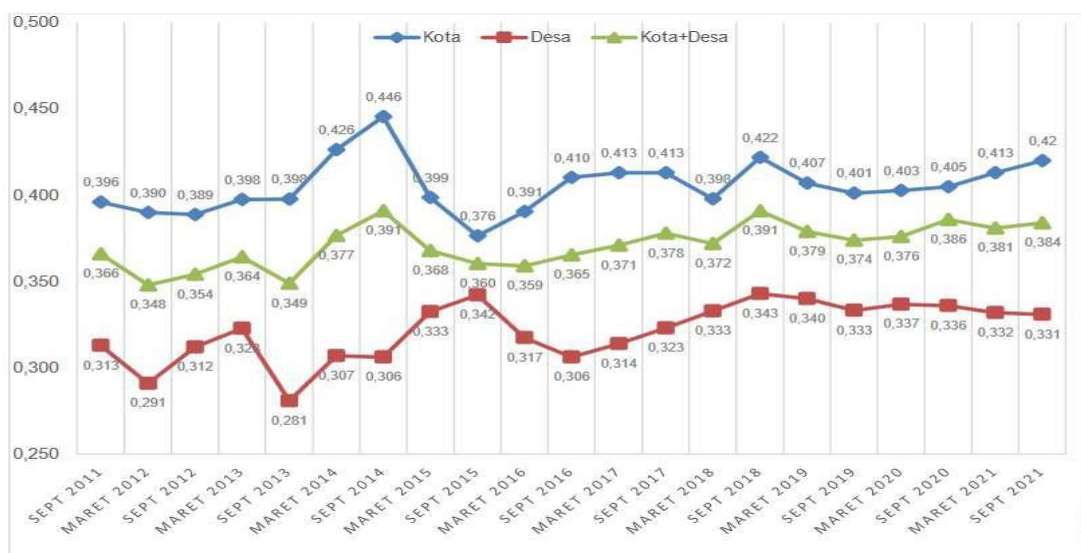
2.1.2.4. Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio, nilai Gini Ratio berkisar antara 0 - 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio provinsi Nusa Tenggara Barat pada September 2021 adalah sebesar 0,384, lebih tinggi dari Maret 2021 tetapi lebih rendah dibandingkan September 2020. Dalam sepuluh tahun terakhir, nilai Gini Ratio provinsi NTB berfluktuasi dalam rentang yang cukup stabil, yaitu diantara 0,348 sampai 0,391. Nilai tertinggi Gini Ratio NTB adalah 0,391 yaitu pada September 2014 dan September 2018. Sedangkan nilai terendah adalah 0,348 yaitu pada September 2012.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,420, mengalami kenaikan sebesar 0,007 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,413. Jika dibandingkan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,405, Gini Ratio September 2021 daerah perkotaan

meningkat sebesar 0,015 poin. Kemudian untuk daerah perdesaan, Gini Ratio September 2021 tercatat sebesar 0,331. Berbeda dengan daerah perkotaan, Gini Ratio pada daerah perdesaan justru turun 0,001 poin dari Maret 2021. Sedangkan jika dibandingkan September 2020, nilai ini turun 0,005 poin.

Gambar.2.7. Perkembangan Gini Ratio, September 2011 – September 2021



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

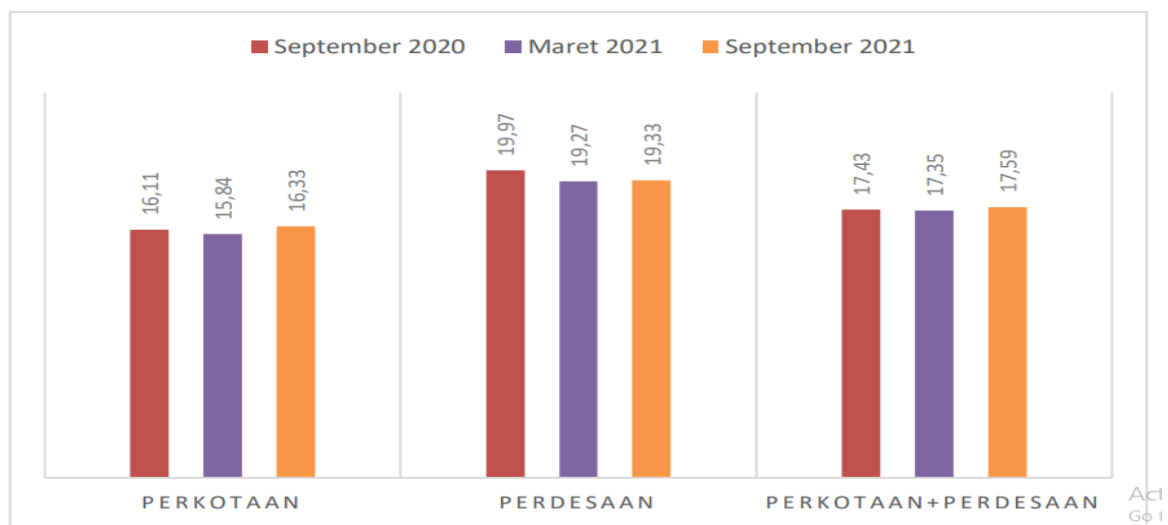
Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Perkembangan distribusi persentase pengeluaran Nusa Tenggara Barat pada September 2021, pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,59 persen, yang berarti provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada September 2021 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar

17,35 persen. Selain itu, jika dibandingkan dengan September 2020, nilai ini mengalami kenaikan 0,16 persen poin.

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini Ratio, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama yaitu ketimpangan di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar 16,33 persen atau tergolong ketimpangan sedang. Sementara itu, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada September 2021 adalah sebesar 19,33 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah.

Gambar.2.8. Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen terbawah Provinsi Nusa Tenggara Barat September 2020, Maret 2021, dan September 2021

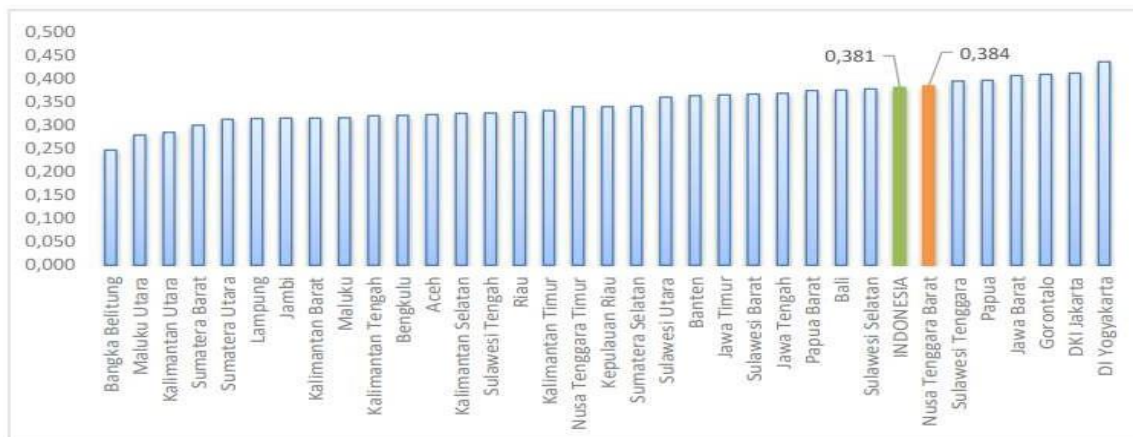


Sumber: Diolah dari data Susenas September 2020, Maret 2021, dan September 2021

Selanjutnya apabila dibandingkan secara nasional dengan Provinsi lainnya yang diurutkan dari persentase terkecil, Gini Ratio Provinsi NTB pada September 2021 berada di urutan ke 28 dari 34 Provinsi di Indonesia. Kemudian, provinsi di Indonesia yang tercatat sebagai provinsi dengan Gini Ratio terendah pada September 2021 adalah Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,247. Sementara

provinsi dengan Gini Ratio tertinggi ditempati oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gini Ratio sebesar 0,436.

Gambar.2.9. Gambar Gini Ratio Menurut Provinsi September 2021



Sumber: Diolah dari data Susenas September 2020, Maret 2021, dan September 2021

Dibanding dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,381, terdapat tujuh provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,436), DKI Jakarta (0,411), Gorontalo (0,409), Jawa Barat (0,406), Papua (0,396), Sulawesi Tenggara (0,394) dan Nusa Tenggara Barat (0,384).

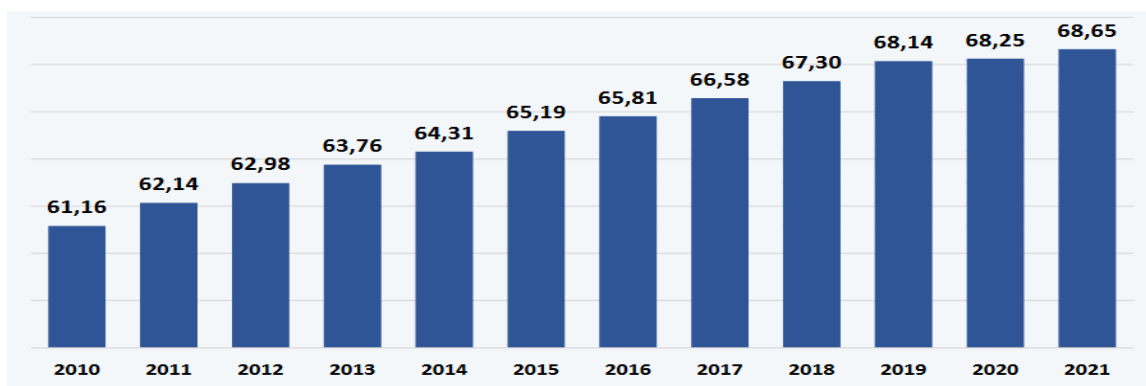
2.1.2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umurpanjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

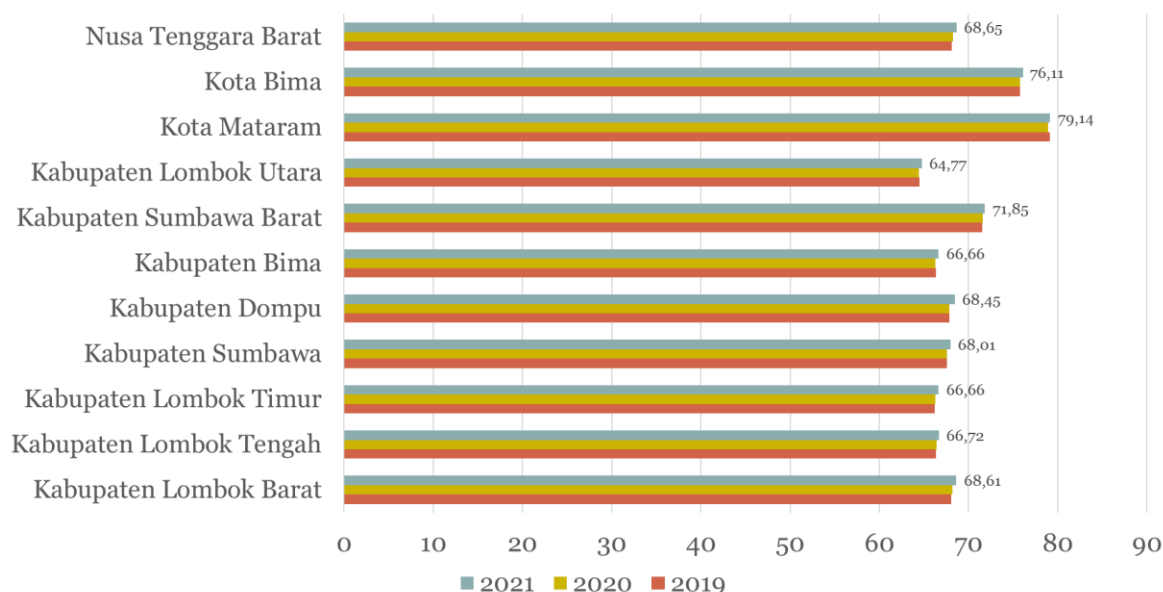
Dalam satu dekade pembangunan manusia di Provinsi NTB terus mengalami kemajuan. IPM Provinsi NTB meningkat dari 61,16 pada tahun 2010 menjadi 68,14 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Provinsi NTB rata-rata tumbuh sebesar 1,21 persen per tahun. Namun, pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Provinsi NTB. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 68,25 atau tumbuh 0,16 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kemudian IPM Provinsi NTB tahun 2021 adalah

sebesar 68,65 atau tumbuh 0,59 persen. Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2009-2021 menjadi sebesar 1,06 persen per tahun.

Gambar.2.10. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2021



Gambar.2.11. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2021

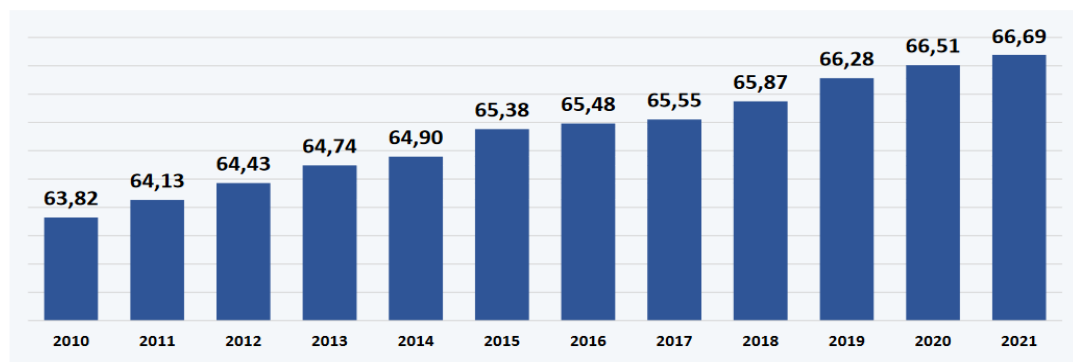


Sumber: BPS NTB, 2022

Hal ini menunjukkan bahwa IPM Provinsi NTB masih berada pada kategori capaian sedang. Pertumbuhan IPM Provinsi NTB di tahun 2021 mencapai 0,59

persen. Dari dimensi kesehatan yang digambarkan oleh indikator Umur Harapan Hidup, di tahun 2021 Provinsi NTB mencapai 66,69 tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 0,18 tahun dibandingkan tahun 2020. Dimensi pendidikan digambarkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. HLS Provinsi NTB di tahun 2021 Provinsi NTB mencapai 13,90 tahun, meningkat 0,20 tahun dibandingkan tahun 2020. Sedangkan RLS-nya sebesar 7,38 tahun dan nilai ini meningkat sebanyak 0,07 tahun dibanding tahun sebelumnya. Dari dimensi hidup layak yang digambarkan oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan, capaian Provinsi NTB di tahun 2021 sebesar 10,38 juta rupiah per orang per tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 26 ribu rupiah dibandingkan tahun 2020.

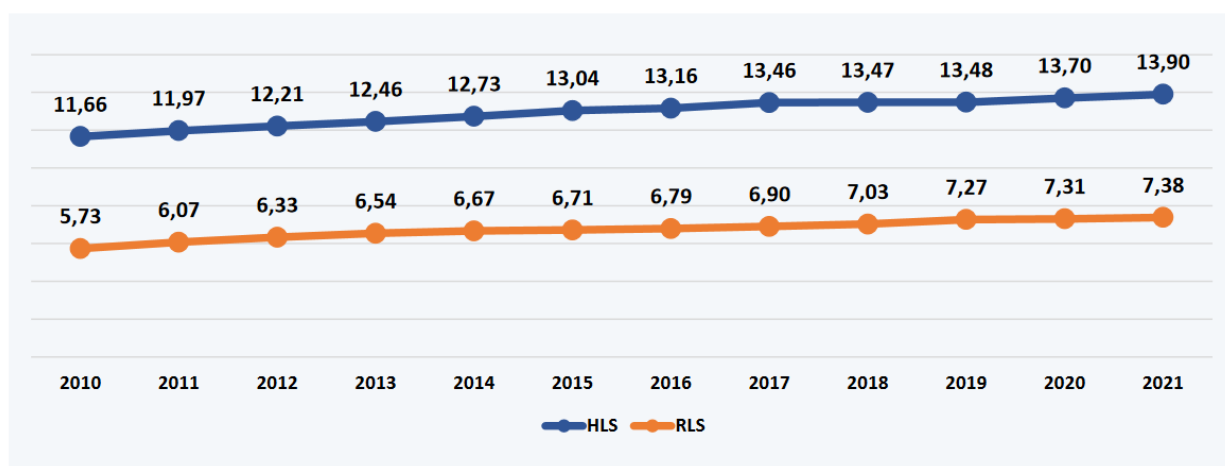
**Gambar.2.12 Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2021**



Sumber: BPS NTB, 2021

Selanjutnya dari dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas.

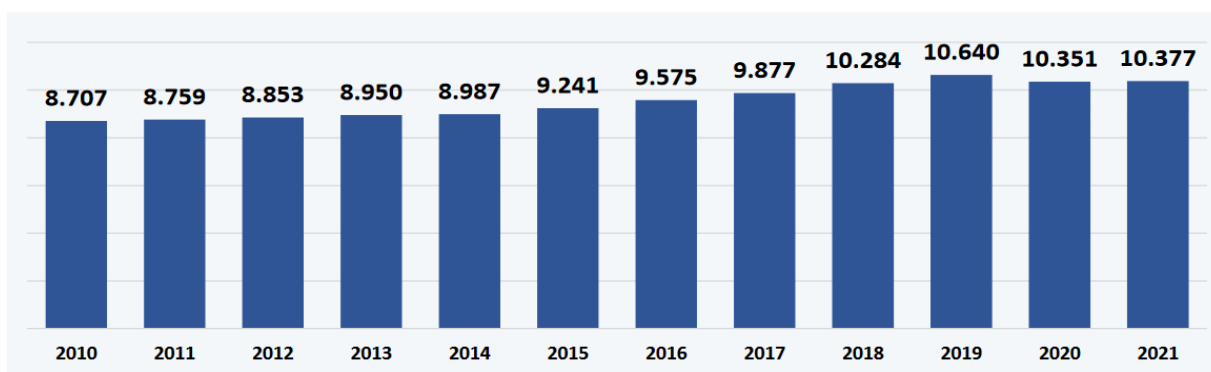
Gambar.2.13. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2021



Sumber: BPS NTB, 2021

Kemudian dari dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2010) yang disesuaikan.

Gambar.2.14. Perkembangan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2021 (Rp 000)

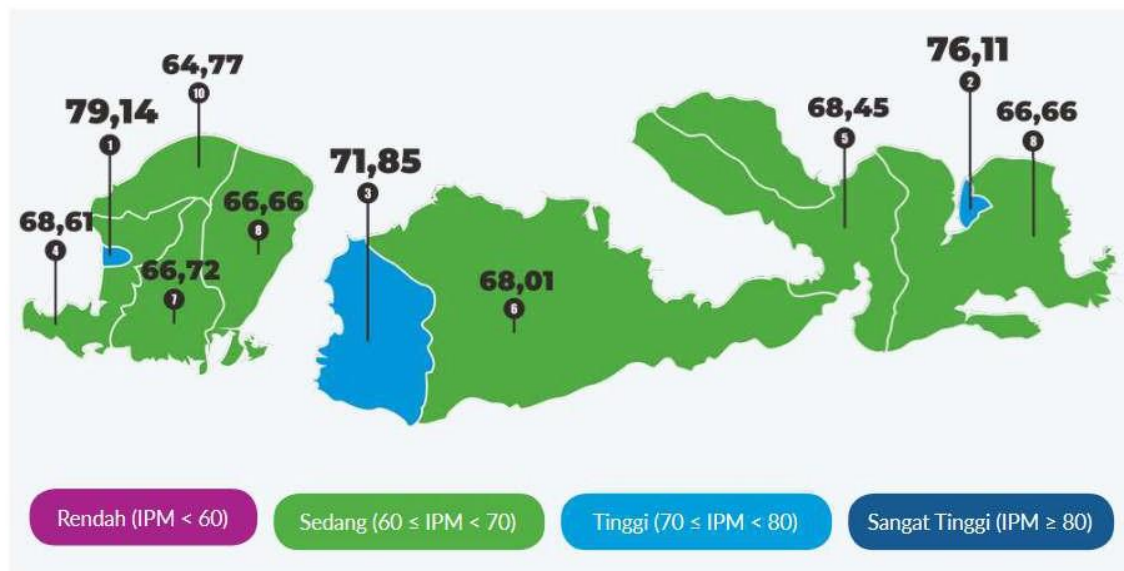


Sumber: BPS NTB, 2021

Seiring dengan pertumbuhan IPM Provinsi NTB, pada tahun 2021 sepuluh kabupaten/kota di Provinsi NTB juga mengalami peningkatan IPM. Wilayah yang mengalami peningkatan IPM terbesar adalah Kabupaten Dompu, sebaliknya Kota Mataram mengalami peningkatan IPM yang terendah. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan

peringkat di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara (64,77), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Mataram (79,14). Jumlah kabupaten/kota di Provinsi NTB dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2021 ada sebanyak 3 kabupaten/kota, sedangkan 7 lainnya masih berstatus “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$). Sejak tahun 2017, IPM Kabupaten Sumbawa Barat mencapai status tinggi dan bersanding dengan Kota Mataram dan Kota Bima yang telah lama menyandang status tinggi.

Gambar.2.15. IPM Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2021



Sumber: BPS NTB, 2022

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat multidimensional. Pendekatan yang dilakukan dengan satu bidang ilmu tertentu belum cukup untuk menjelaskan makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang sering dipergunakan dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah definisi kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan dalam mencapai standar kehidupan yang minimum. Pengertian dari kemiskinan sampai saat ini telah mengalami perluasan, karena semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi tetapi telah meluas sampai kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik.

Kemiskinan juga dapat dikatakan dengan suatu keadaan seseorang ketika tidak mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan dan pakaian, rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan dan keahlian yang rendah, keterkucilan sosial karena disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Singkatnya, kemiskinan dapat dijelaskan sebagai suatu standar kehidupan yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan dalam materi pada sejumlah atau golongan orang daripada standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu kesempatan yang tidak sama dalam mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis pada kekuatan sosial tidak hanya terbatas pada (1) modal produktif atau aset (misalnya suatu organisasi sosial politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, partai politik, sindikasi, koperasi dan lain-lain), tetapi juga pada (2) net work atau jaringan sosial untuk memperoleh suatu pekerjaan, barang-barang dan lain-lain; (3) pengetahuan dan keterampilan yang memadai; dan (4) informasi yang berguna yang digunakan memajukan kehidupan mereka. Sementara itu, *United Nations Development Program* (UNDP) menjelaskan tentang kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memperluas pilihan-pilihan dalam hidupnya, antara lain dengan cara memasukkan

penilaian “tidak ada partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator dari kemiskinan.

Menurut *World Bank*, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain (BPS, 2015). Sedangkan konsep yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*Basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan dihitung dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK).

Berdasarkan cara pendekatannya, ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai “*inability of the individual to meet basic needs*” (Tjondronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Konsep tersebut sejalan dengan Sen (Meier, 1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah “*the failure to have certain minimum capabilities*”. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu melebihi kemampuan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin. Perhitungan penduduk miskin di Indonesia pada dasarnya mengikuti konsep di atas.

Menurut definisinya, terdapat empat definisi kemiskinan yang digunakan saat ini, yaitu:

1. Kemiskinan absolut: kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan). Dapat dikatakan pula kemiskinan absolut adalah orang atau rumah tangga yang berada atau hidup di bawah standar minimal kehidupan. Standar ini dikenal dengan sebutan Garis Kemiskinan (GK). Dalam hal ini Garis Kemiskinan merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin. Sehingga orang atau rumah tangga yang berada di bawah GK masuk dalam kelompok miskin.

Konsep atau definisi ini bersifat mutlak tanpa memandang jenis kelamin, pekerjaan, budaya, kondisi ataupun status sosialnya.

2. **Kemiskinan relatif:** kemiskinan adalah kondisi seseorang atau rumah tangga yang masih jauh lebih rendah kondisinya dibandingkan keadaan masyarakat sekitar. Seseorang atau rumah tangga berada dalam keadaan miskin meskipun sesungguhnya sudah berada di atas standar minimal (GK). Dalam hal ini Garis Kemiskinan sudah tidak menjadi pembatas lagi, karena kebutuhan minimal hidup orang atau rumah tangga ini sudah tidak hanya pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan saja, tetapi sudah masuk unsur gaya hidup, diantaranya unsur kualitas makanan, hiburan, komunikasi, dsb. Konsep atau definisi ini mengandung dimensi ketimpangan di dalamnya.
3. **Kemiskinan Subyektif:** kemiskinan adalah kondisi atau status sosial seseorang atau rumah tangga yang memenuhi kriteria-kriteria miskin tertentu yang sudah ditetapkan. Kriteria ini dapat berupa kriteria yang obyektif melalui kajian ataupun tidak, seperti yang telah umum digunakan oleh masyarakat kita, misalnya janda, jompo, anak yatim, pengangguran, orang cacat, guru ngaji, dsb. Sehingga orang atau rumah tangga yang di dalamnya terdapat orang yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut, masuk ke dalam kelompok miskin.
4. **Budaya Kemiskinan:** kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk dapat secara mandiri memperbaiki kondisi kehidupannya. Sehingga orang atau rumah tangga ini sulit untuk dapat lepas dari lingkaran kemiskinan-pemiskinan (budaya kemiskinan). Konsep atau definisi ini mengandung dimensi yang lebih luas karena tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial budaya. Karena kemiskinan kultural dapat disebabkan oleh faktor alami maupun tidak. Kultur/budaya atau pola pikir seseorang atau masyarakat merupakan faktor alami dari budaya kemiskinan. Sedangkan kesalahan strategi atau kebijakan pembangunan yang menyebabkan tertutupnya atau bahkan matinya kesempatan seseorang untuk dapat memperbaiki kondisi hidupnya merupakan faktor bukan alami budaya kemiskinan.

Tidak tercapainya standar hidup layak oleh seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya multidimensi seperti tidak mencukupinya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya kesempatan produktif dan tidak mencukupinya perlindungan social. Rendahnya kualitas SDM dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya yang diselenggarakan pemerintah. Sementara kurangnya kesempatan produktif dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan dan iklim wirausaha khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Sementara perlindungan sosial yang cukup akan melindungi masyarakat dari guncangan sosial yang dapat menyebabkan seseorang jatuh kedalam kemiskinan ketika terjadi bencana, sakit ataupun krisis ekonomi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Dengan demikian percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
5. Mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

Di dalam publikasi ini hanya menampilkan data atau indikator yang berpijak pada tiga konsep pertama (kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif) saja. Sedangkan budaya kemiskinan tidak disajikan, karena sulitnya menemukan indikator yang tepat dan berkesinambungan untuk dapat menggambarkan kondisi tersebut.

3.2. Metodologi Penghitungan Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin

Berbeda dengan penentuan garis kemiskinan (GK) yang digunakan oleh Bank Dunia (pendapatan per kapita per hari US\$ 1,25 untuk kategori negara *low income* atau US\$ 2 untuk negara dengan 5 kategori *lower middle income*), perkembangan

tingkat kemiskinan dengan menggunakan konsep absolut yang digunakan oleh BPS perlu mendapatkan perhatian secara seksama, karena dua alasan:

- Pertama, standar kemiskinan (GK) yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan bersifat dinamis, untuk menyesuaikan dengan perkembangan pola konsumsi penduduk kelas bawah, khususnya untuk standar kecukupan non makanan (perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan). Sedangkan untuk standar kecukupan makanan sampai saat ini masih dianggap ideal yaitu setara dengan 2100 kalori per kapita per hari.
- Kedua, standar kemiskinan sangat sensitive terhadap gejolak harga-harga (inflasi) kebutuhan pokok baik makanan maupun non makanan. Ketika harga-harga naik, GK juga meningkat sesuai dengan kenaikan nilai yang dibayar penduduk kelas bawah untuk memenuhi standar minimal kebutuhan dasarnya (makanan, perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan).

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) Merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dll).

$$GKM^*_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM^*_{jp} : Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p .

P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p .

Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p .

V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p .

j : Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p : Provinsi ke- p .

Selanjutnya GKMj tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{kjp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{kjp}},$$

Dimana :

K_{kjp} : Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p

$\overline{HK}_{jp}$: Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j dan provinsi p

V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p

r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j

k : Jenis komoditi non-makanan terpilih

j : Daerah (Perkotaan atau pedesaan)

p : Provinsi ke-p

Formula garis kemiskinan dapat dinyatakan sbb:

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana:

GK : Garis Kemiskinan

GKM : Garis Kemiskinan Makanan

GKNM : Garis Kemiskinan Non Makanan.

Garis Kemiskinan (GK) dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan perkapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas GKS. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang diinflasi dengan inflasi umum (IHK). GK dibagi ke dalam dua bagian yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan GKM berasal dari Susenas Modul Konsumsi data yang rinci mengenai pengeluaran konsumsi baik dalam bentuk kuantitas maupun nilai terutama untuk 52 komoditi dasar makanan, sehingga nilai pengeluaran makanan setara 2100 kalori dapat diestimasi secara tepat. Tahapan penghitungannya adalah sebagai berikut:

- Tentukan penduduk referensi, yaitu penduduk yang hidup sedikit di atas GK. Setelah itu dihitung nilai pengeluaran (V) dan kalori (K) untuk seluruh pengeluaran 52 komoditi makanan dari penduduk referensi. Kemudian dihitung nilai/harga rata-rata per kalori (H) dengan cara membagi nilai pengeluaran (V) dengan kalori (K) dan terakhir di hitung GK untuk makanan, yaitu nilai pengeluaran setara 2100 kalori ($H \times 2100$).
- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub

kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

- Nilai kebutuhan minimum untuk komoditi non makanan meliputi perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan dihitung dengan mengalikan suatu rasio komoditi/sub kelompok terhadap total pengeluaran komoditi/sub kelompok (r) dengan nilai pengeluaran sub kelompok (V) tersebut. Rasio (r) ini diperoleh dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) dan terakhir dilakukan pada tahun 2004. GK non makanan merupakan nilai total dari hasil perkalian ($r \cdot V$) tersebut.
- GK merupakan penjumlahan dari GK makanan dan GK non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin diperoleh dengan cara memotong/membatasi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang kurang dari GK setelah data mentah (*raw data*) diurutkan terlebih dahulu dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang terkecil hingga terbesar.

3.3. Persentase Penduduk Miskin, Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Setelah jumlah penduduk miskin diperoleh, maka selanjutnya dihitung persentase penduduk miskin berdasarkan penduduk Susenas Kor sebagai nilai persentil untuk menghitung GK. *Foster-Greer- Thorbecke* (1984) telah merumuskan suatu indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Ukuran tersebut terdiri dari 3 indikator yaitu :

1. **Head Count Index/HCI (P_0)** yang menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah GK. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$$\alpha = 0$$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk.

2. Kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin (GK). Semakin tinggi nilai indeks ini semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$$\alpha = 1$$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada

dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

3. Keparahan kemiskinan (*Poverty Serevity Index/P2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

3.4. Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Beberapa tujuan (*goals*) dalam agenda pembangunan berkelanjutan selaras dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2026, yaitu terutama untuk memutuskan mata rantai

kemiskinan antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

4.1. IDENTIFIKASI PRIORITAS INTERVENSI

Salah satu model analisis untuk menghampiri determinan masalah adalah evaluasi dampak (*impact evaluation*), dengan menggunakan basis teori perubahan (*theory of change*) atau logika program. Teori perubahan (*theory of change*) atau logika program adalah cara untuk menentukan *outcome* apa yang ingin diwujudkan dan bagaimana itu akan dicapai melalui intervensi program kebijakan. Alih-alih untuk memproyeksikan outcome dari rangkaian program, logika program membalikkan proses itu dimana *outcome* (tujuan) dirunut kebelakang kepada prakondisi untuk pencapaiannya. Dengan demikian, logika program akan menjelaskan alasan mengapa sebuah program atau kebijakan harus ditempuh.

Sebagai sebuah peta jalur (*road-map*) bagi pencapaian outcome, logika program tidak hanya berguna untuk menentukan program yang dibutuhkan, tetapi juga dapat menjadi basis untuk pemantauan dan evaluasinya. Penyusunan teori perubahan dapat diawali dengan mengumpulkan dan mereview hasil-hasil kajian dan evaluasi yang pernah dilakukan. Dari bahan ini dapat diperkirakan apa yang akan terjadi jika intervensi yang sama diterapkan. Proses penyusunan logika program melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pertama. Menetapkan tujuan (*goals*) dan indikatornya. Pernyataan tujuan menjelaskan dampak (*impact*) akhir yang ingin dicapai oleh program atau kebijakan. Sebaiknya tujuan hanya mengandung satu atau dua inti pernyataan saja. Tujuan ini juga hendaknya menyatakan dampak langsung dari program atau kebijakan; bukan dampak yang terlalu jauh yang mungkin terjadi setelah dampak langsung itu tercapai.

Langkah kedua. Mengidentifikasi capaian antara (*intermediate outcome*) dan indikatornya. Capaian antara adalah seluruh bentuk perubahan, yang dapat dibedakan satu sama lain, yang menjadi syarat atau prakondisi bagi tercapainya

tujuan. Bentuk-bentuk perubahan itu harus cukup komprehensif sesuai kompleksitas program.

Langkah ketiga. Mengidentifikasi strategi atau program. Strategi atau program yang dimaksud disini adalah semua rancangan kebijakan yang bisa membawa manfaat secara langsung kepada penerimanya. Pernyataan strategi atau program ini harus menjelaskan apa yang hendak dituju oleh rancangan kebijakan tersebut.

Langkah keempat. Menarik anak panah hubungan sebab akibat. Anak panah ini akan menunjukkan strategi atau program apa yang ditujukan untuk menghasilkan capaian tertentu.

Langkah kelima. Menjelaskan asumsi kunci. Faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan intervensi, disetiap jalur hubungan sebab-akibat yang telah disusun, harus diidentifikasi sebagai asumsi. Asumsi yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan intervensi yaitu asumsi kunci, perlu menjadi bagian dari aspek yang dievaluasi.

Asumsi biasanya menyatakan salah satu dari hal-hal berikut:

- Penegasan tentang keterkaitan antara capaian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam peta teori perubahan.
- Pembuktian bahwa seluruh prakondisi penting yang dibutuhkan oleh program atau kebijakan telah teridentifikasi.
- Pembuktian tentang keterkaitan antara kegiatan-kegiatan program dengan capaian-capaian yang diharapkan.
- Pemahaman tentang faktor-faktor kontekstual atau lingkungan yang akan mendukung atau menghambat proses maupun hasil intervensi.

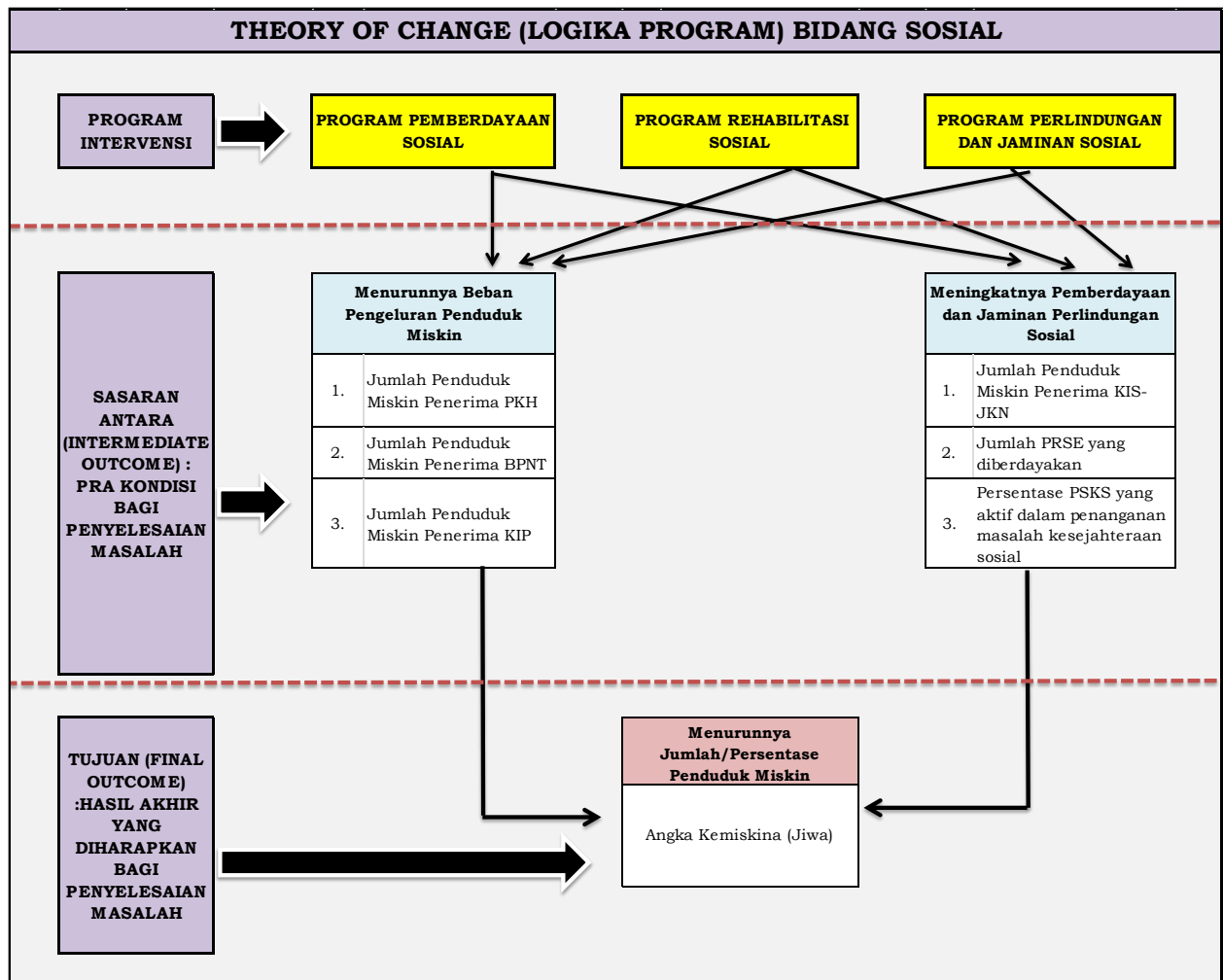
Secara spesifik, logika program dalam evaluasi dampak bermanfaat untuk menjelaskan:

- Pertanyaan evaluasi yang dapat diajukan, khususnya bagi elemen hubungan sebab akibat yang belum didukung oleh bukti yang memadai.

- Variabel yang perlu dikumpulkan datanya.
- Capaian antara yang dapat digunakan sebagai isyarat keberhasilan program atau kebijakan manakala dampak yang diharapkan belum dapat dilihat dalam kerangka waktu evaluasi.
- Aspek-aspek pelaksanaan yang perlu ditinjau.
- Faktor-faktor kontekstual yang juga perlu diperoleh datanya dan dianalisis untuk diketahui pengaruhnya terhadap program atau kebijakan.

4.1.1. LOGIKA PROGRAM KEMISKINAN KONSUMSI

Penyusunan logika program bidang sosial bertujuan untuk memetakan atau mengidentifikasi tujuan *final outcome* yang diharapkan ingin dicapai pada sektor sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan memetakan program intervensi apa yang relevan untuk mewujudkan *final outcome* tersebut. Berdasarkan gambar 4.1, final outcome atau hasil akhir yang diharapkan bagi penyelesaian masalah sektor sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “**Menurunnya Jumlah atau persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat**”, dengan indikator keberhasilan yaitu: “**Angka Kemiskinan**”. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja secara layak. Kebutuhan Pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum/ kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.



Sumber: Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022

Gambar 4.1. Theory of Change (Logika Program) Bidang Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pada gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa setelah dilakukan *mapping* atau pemetaan *final outcome* (tujuan) dari logika program bidang sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya dilakukan identifikasi sasaran antara (*intermediate outcome*) yaitu pra kondisi bagi penyelesaian masalah pada sektor Sosial. Identifikasi sasaran antara adalah tahapan kedua dari penyusunan logika program (*theory of change*) sektor sosial. Ada dua sasaran antara (*intermediate outcome*) beserta indikatornya telah diformulasikan yang diduga akan berdampak pada pencapaian tujuan (*goals*) yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Sasaran antara (*intermediate outcome*) pertama yaitu “**Menurunnya beban pengeluaran penduduk miskin**”, dengan tiga (indikator) yaitu:

1. Jumlah penduduk Miskin Penerima PKH

[Program Keluarga Harapan](#) yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.

2. Jumlah Penduduk Miskin Penerima BPNT

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Penyaluran bantuan pangan secara non tunai lewat BPNT mengacu pada 4 (empat) prinsip umum, yaitu:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini.
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari BPNT, yaitu:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia.
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

3. Jumlah Penduduk Miskin Penerima KIP

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah usia enam sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin. PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal sd sampai sma/smk dan jalur non formal paket A sampai paket C dan pendidikan khusus. Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Sasaran antara (*intermediate outcome*) kedua yaitu “**Jumlah Penduduk Miskin penerima KIS-JKN**”, dengan 3 (tiga) indikator yaitu

1). Jumlah Penduduk Miskin Penerima KIS-JKN;

Indikator ini untuk melihat sejauhmana dampak atau pengaruh program JKN-KIS dalam mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin di bidang kesehatan. Secara konseptual, Kartu Indonesia Sehat (KIS) bertujuan untuk menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. KIS berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan, yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS. KIS merupakan perluasan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang diluncurkan pemerintah sebelumnya, yaitu pada 1 Januari 2014. Harapannya, semakin banyak penduduk miskin yang ter-cover program KIS-JKN, angka kemiskinan akan mengalami penurunan.

2). Jumlah PRSE yang diberdayakan;

Indikator ini untuk melihat sejauhmana dampak pemberdayaan terhadap perempuan kepala keluarga (*women as a breadwinner*) yang berstatus rentan sosial ekonominya berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Definisi PRSE menurut Departemen Sosial (Depsos) RI adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun yang menikah atau belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau istri yang ditinggal suaminya tanpa batas waktu. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) menurut Kementerian Sosial (Kemensos) RI adalah sosok yang masih ada rasa kurang percaya diri, apatis, rendah diri, serta aspirasi material yang tinggi. PRSE dikategorikan terbebas dari masalah kesejahteraan sosial bila kebutuhan perempuan tersebut dapat terpenuhi yang mencakup tiga (3) aspek yaitu terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial.

3). Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kementerian Sosial RI, terdapat 6 (enam) jenis PSKS yaitu 1). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM); 2). Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS); 3). Organisasi Sosial (ORSOS); 4). Karang Taruna; 5). Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial; 6). Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat.

4.1.2. LOGIKA PROGRAM KEMISKINAN NON KONSUMSI

A. BIDANG PENDIDIKAN

Penyusunan logika program bidang pendidikan bertujuan untuk memetakan atau mengidentifikasi tujuan *final outcome* yang diharapkan ingin dicapai pada sektor

pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan memetakan program intervensi apa yang relevan untuk mewujudkan *final outcome* tersebut. Berdasarkan gambar 4.1, final outcome atau hasil akhir yang diharapkan bagi penyelesaian masalah sektor pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “**Meningkatnya akses dan perluasan kesempatan belajar di Pendidikan Dasar**”, dengan tiga (3) indikator keberhasilan yaitu:

1). Meningkatkan APK SMA/SMK & SMP/MTS (%);

Secara konseptual, Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Tujuan mengukur APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara.

$$APK \text{ SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

APK yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Harapannya adalah ketika APK terutama pada jenjang SMP atau sederajat meningkat dalam jangka panjang dapat menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

2). Meningkatkan APM SMA/SMK dan SMP/MTs (%);

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Sedangkan kegunaan atau tujuan pengukuran APM adalah untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

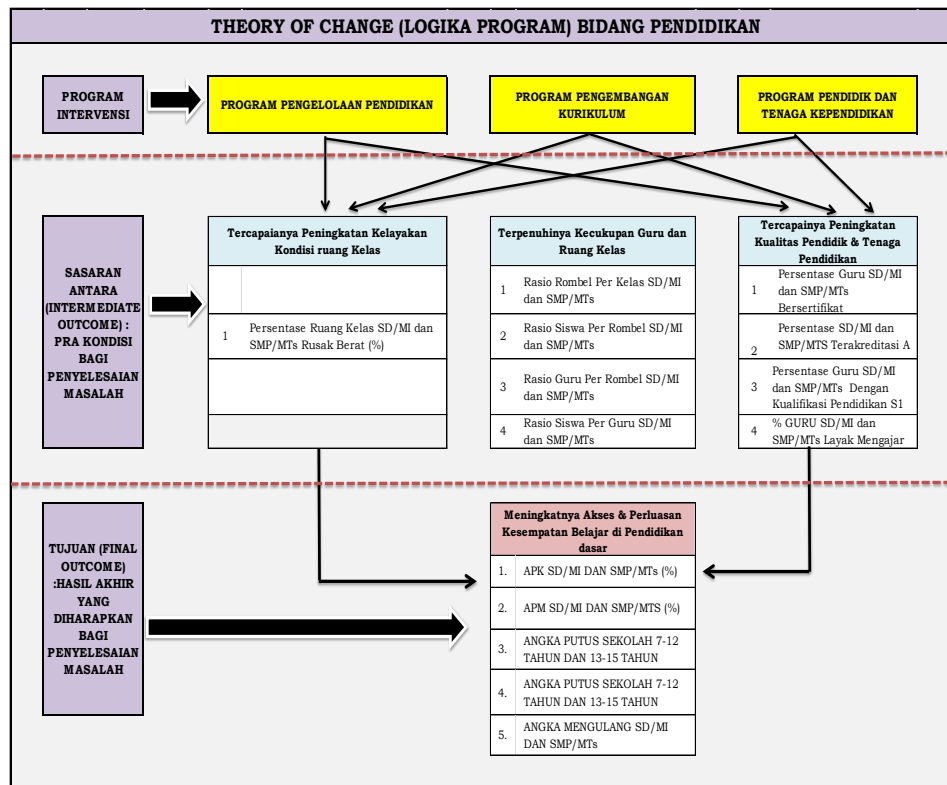
$$\text{APM SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Jika demikian maka sesungguhnya keberhasilan pelayanan pendidikan di suatu wilayah/negara dilihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Harapannya adalah ketika APM terutama pada jenjang SMP atau sederajat meningkat dalam jangka panjang dapat menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

3). Menurunnya Angka Putus Sekolah Penduduk Usia Sekolah 7-12 Tahun dan Usia Sekolah 13-15 tahun.

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SMP menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SMP yang dinyatakan dalam persen.

Problem putus sekolah merupakan masalah yang menghambat kemajuan tingkat kualitas sumber daya manusia. Rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang, akan berdampak pada sulitnya memperoleh pekerjaan yang ada dimana pekerjaan yang ada terkadang membutuhkan standar pendidikan yang tinggi. Hal tersebut dapat membuat seseorang menjadi pengangguran, dan berimplikasi pada meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan.



Sumber: Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022

Gambar 4.2. Theory of Change (Logika Program) Bidang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pada gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa setelah dilakukan *mapping* atau pemetaan *final outcome* (tujuan) dari logika program bidang pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya dilakukan identifikasi sasaran antara (*intermediate outcome*) yaitu pra kondisi bagi penyelesaian masalah pada sektor pendidikan. Identifikasi sasaran antara adalah tahapan kedua dari penyusunan logika program (*theory of change*) sektor pendidikan. Ada tiga sasaran antara (*intermediate outcome*) beserta indikatornya telah diformulasikan yang diduga akan berdampak pada pencapaian tujuan (*goals*) yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Sasaran antara (*intermediate outcome*) pertama yaitu “ **Meningkatnya Kelayakan Kondisi Ruang Kelas**”, dengan indikator Persentase Ruang Kelas SMP Rusak Berat. Kondisi infrastruktur pendidikan, terutama

gedung sekolah yang banyak mengalami kerusakan akan mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Mengurangi jumlah ruang kelas yang rusak merupakan agenda yang harus diperjuangkan dalam upaya menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan APK dan APM terutama pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Sasaran antara (*intermediate outcome*) kedua yaitu “**terpenuhinya kecukupan guru dan ruang kelas**”, dengan 4 (empat) indikator yaitu 1). Rasio Rombel Per Kelas SMP; 2). Rasio Siswa per Rombel SMP; 3). Rasio Guru Per Rombel SMP; dan 4). Rasio Siswa per Guru SMP.

Sasaran antara (*intermediate outcome*) ketiga yaitu” Meningkatnya kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan dengan tiga (3) indikator yaitu 1). Persentase Guru SMP Bersertifikat; 2). Persentase Guru SMP dengan Kualifikasi Pendidikan minimal S1; dan 3). Persentase SMP Terakreditasi A.

Tabel 4.1. Parameter Pendidikan Sesuai SPM/SNP

NO .	PARAMETER	KETERANGAN	JENJANG PENDIDIKAN	ACUAN
1	Rasio Siswa SMA/SMK per Rombongan Belajar	Perbandingan antara jumlah peserta didik dengan jumlah rombongan belajar pada masing-masing SMA/SMK. "Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMA/SMK tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang ", (Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, Pasal 2 poin 2)	SMA/SMK	SPM
2	Rasio siswa per guru SMA/SMK	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK. "Setiap SMA/SMK tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan".	SMA/SMK	SPM

NO .	PARAMETER	KETERANGAN	JENJANG PENDIDIKAN	ACUAN
		(Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, ayat (2) poin 5).		
3	Rasio Siswa SMA/SMK per Ruang Kelas	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan SMA/SMK tidak melebihi 32 orang siswa. "Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMA/SMK tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis". (Permendikbud No. 23 Tahun 2013 pasal 2 POIN 2).	SMA/SMK	SPM
4	Rasio Siswa SMA/SMK per Ruang Kelas	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan SMA/SMK. "Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar. Kapasitas maksimum ruang kelas 28 peserta didik. Rasio minimum luas ruang kelas 2 m ² /peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m ² . Lebar minimum ruang kelas 5 m". (Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana).	SMA/SMK	SNP

NO .	PARAMETER	KETERANGAN	JENJANG PENDIDIKAN	ACUAN
	Rasio Siswa SMA/SMK per Guru Kualifikasi	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV pada jenjang pendidikan SMA/SMK. "Setiap SMA/SMK tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan" (Permendikbud No. 23 Tahun 2013 pasal 2, ayat (2) poin 5). "Setiap SMA/SMK tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik". (Permendikbud No. 23 Tahun 2013 pasal 2 poin 7).	SMA/SMK	SPM
6	Rasio Siswa SMA/SMK per Guru Kualifikasi	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV pada jenjang pendidikan SMA/SMK, semua guru (100%) harus berkualifikasi S1/D-IV. "Guru pada SMA/SMK, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMA/SMK (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi". (Permendiknas No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru).	SMA/SMK	SNP

NO .	PARAMETER	KETERANGAN	JENJANG PENDIDIKAN	ACUAN
7	Rasio Siswa SMA/SMK per Guru Sertifikasi	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru bersertifikasi pada jenjang pendidikan SMA/SMK. "Guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang SD atau yang sederajat adalah 20:1 dan untuk untuk MI atau yang sederajat 15:1". (PP No. 74 tahun 2008, Pasal 17, Tentang Guru yang mengacu pada SNP).	SMA/SMK	SNP
8	Rasio guru per sekolah SMA/SMK	Perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK. "Setiap SMA/SMK tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan". (Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, ayat (2) poin 5).	SMA/SMK	SNP
9	Rasio Guru SMA/SMK Berkualifikasi Akademik per Sekolah	Perbandingan antara jumlah guru berkualifikasi minimum S1/DIV dengan jumlah sekolah SMA/SMK. "Guru pada SMA/SMK, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMA/SMK (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi". (Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi guru).	SMA/SMK	SNP

NO .	PARAMETER	KETERANGAN	JENJANG PENDIDIKAN	ACUAN
10	Rasio Rombongan Belajar per ruang kelas	Perbandingan antara jumlah rombongan belajar dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan SMA/SMK."Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis". (Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2).	SMA/SMK	SPM
11	Persentase Guru SMA/SMK ber Sertifikasi	Perbandingan antara jumlah guru bersertifikasi dengan jumlah guru seluruhnya pada jenjang pendidikan SMA/SMK dan dinyatakan dalam persen. "Setiap SMA/SMK tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik". (Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, poin 2.a.7).	SMA/SMK	SNP
12	Rasio Rombongan Belajar per sekolah SMA/SMK	Perbandingan antara jumlah rombongan belajar dengan jumlah sekolah di SMA/SMK. "Satu SMA/SMK memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Satu SMA/SMK dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SMA/SMK baru", (Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Sarana Prasarana).	SMA/SMK	SPM

NO .	PARAMETER	KETERANGAN	JENJANG PENDIDIKAN	ACUAN
13	Akreditasi Sekolah SMA/SMK	Akreditasi sekolah SMA/SMK adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan SMA/SMK yang diberikan oleh badan yang berwenang (BAN-SM). "Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 60). "Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan", (PP Nomor 19 Tahun 2005)	SMA/SMK	SPM
14	Rasio Guru SMA/SMK berkualifikasi per sekolah	Perbandingan antara jumlah guru berkualifikasi dengan jumlah guru seluruhnya pada jenjang pendidikan SMA/SMK. "Setiap SMA/SMK tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;". (Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal (2)).	SMA/SMK	SNP
15	Akreditasi Sekolah SMA/SMK	Akreditasi sekolah SMA/SMK adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan SMA/SMK yang diberikan oleh badan yang berwenang (BAN-SM). "Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan	SMA/SMK	UU Sisdiknas dan SNP

NO .	PARAMETER	KETERANGAN	JENJANG PENDIDIKAN	ACUAN
		satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 60). "Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan", (PP Nomor 19 Tahun 2005)		
16	Rasio Guru SMA/SMK bersertifikasi per sekolah	Perbandingan antara jumlah guru bersertifikasi dengan jumlah guru seluruhnya pada jenjang pendidikan SMA/SMK. "Setiap SMA/SMK tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;". (Permendikbud No. 23 Tahun 2013 pasal (2)).	SMA/SMK	SPM
17	Rasio Guru SMA/SMK per sekolah	Perbandingan antara jumlah guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK dengan jumlah sekolah. "Di setiap SMA/SMK tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan" (Permendikbud No. 23 Tahun 2013 lampiran 3).	SMA/SMK	SPM

Mutu pendidikan didasarkan atas mutu input, mutu proses, dan mutu output/ outcome, sebagaimana termuat pada Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mutu Input disesuaikan dengan: standar sarana prasarana, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Hingga saat ini masih merupakan suatu kenyataan di Indonesia, bahwa variansi dalam kabupaten lebih tinggi dari pada variansi antara kabupaten. Ini menunjukkan bahwa pemerataan dalam kabupaten masih merupakan masalah yang serius karena anak-anak belajar di dalam kondisi yang sangat beragam. Sejumlah anak bersekolah di sekolah yang bagus dengan guru yang banyak dan persediaan buku-buku yang memadai, sementara itu anak-anak lainnya belajar di sekolah yang bangunannya tidak layak dengan jumlah guru terbatas serta menghadapi masalah kekurangan buku yang serius. Pemerataan dalam panduan ini menyampaikan isu tersebut dan ukuran-ukuran mengenai sejauh mana anak-anak mempunyai peluang yang sama untuk belajar di sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).

B. BIDANG KESEHATAN

Penyusunan logika program bidang kesehatan bertujuan untuk memetakan atau mengidentifikasi tujuan *final outcome* yang diharapkan ingin dicapai pada sektor kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan memetakan program intervensi apa yang relevan untuk mewujudkan *final outcome* tersebut. Berdasarkan gambar 4.2, final outcome atau hasil akhir yang diharapkan bagi penyelesaian masalah sektor kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu dan Anak”**, dengan empat (empat) indikator keberhasilan yaitu:

1). Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan

karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll (Budi, Utomo. 1985).

$$AKI = \frac{D_{hamil}}{JLH} \times 1000$$

D_{hamil} : Jumlah Kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran

JLH : Jumlah Kelahiran Hidup

Informasi mengenai tingginya MMR (*Maternal Mortality Rate*) akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

2). Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup;

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

$$AKB = \frac{\sum K_{0- <1th}}{\sum \text{Kelahiran Hidup}} \times 1000$$

Dimana,

$K_{0- <1th} =$ Kematian bayi usia di bawah 1(satu) tahun

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai

penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

3). Menurunnya Prevalensi Stunting;

Stunting menunjukkan kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada tahun 2019, survei membuktikan sekitar 30 persen balita Indonesia mengalami *stunting*. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak aspek, mulai dari aspek pendidikan hingga ekonomi. *Stunting* sangat penting untuk dicegah. Hal ini disebabkan oleh dampak *stunting* yang sulit untuk diperbaiki dan dapat merugikan masa depan anak. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia,

juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak

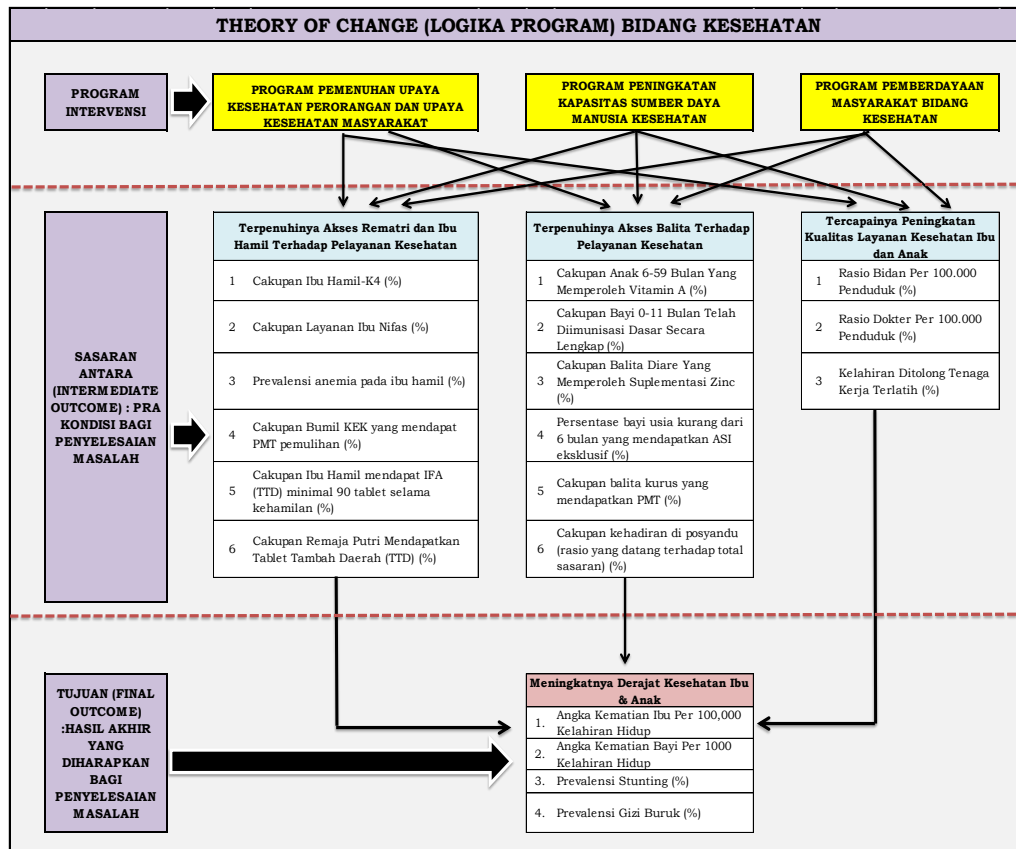
stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.

4). Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk.

Gizi buruk atau yang dikenal sebagai kwashiorkor dalam dunia medis, merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi.

Kwashiorkor kebanyakan menyerang anak-anak di negara-negara berkembang –termasuk Indonesia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sebanyak 54% kematian bayi dan balita disebabkan kondisi [gizi buruk](#). Bahkan risiko kematian anak dengan gizi buruk 13 kali lebih besar dibandingkan dengan anak normal. Komplikasi akibat gizi buruk

atau kwashiorkor sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bila komplikasi terjadi, anak dapat mengalami tahap-tahap perkembangan menjadi lebih lambat dibanding anak normal seusianya. Selain itu anak juga dapat mengalami kesulitan belajar, mudah terserang penyakit berat, gangguan berbagai macam organ, hingga dapat terjadi kematian.



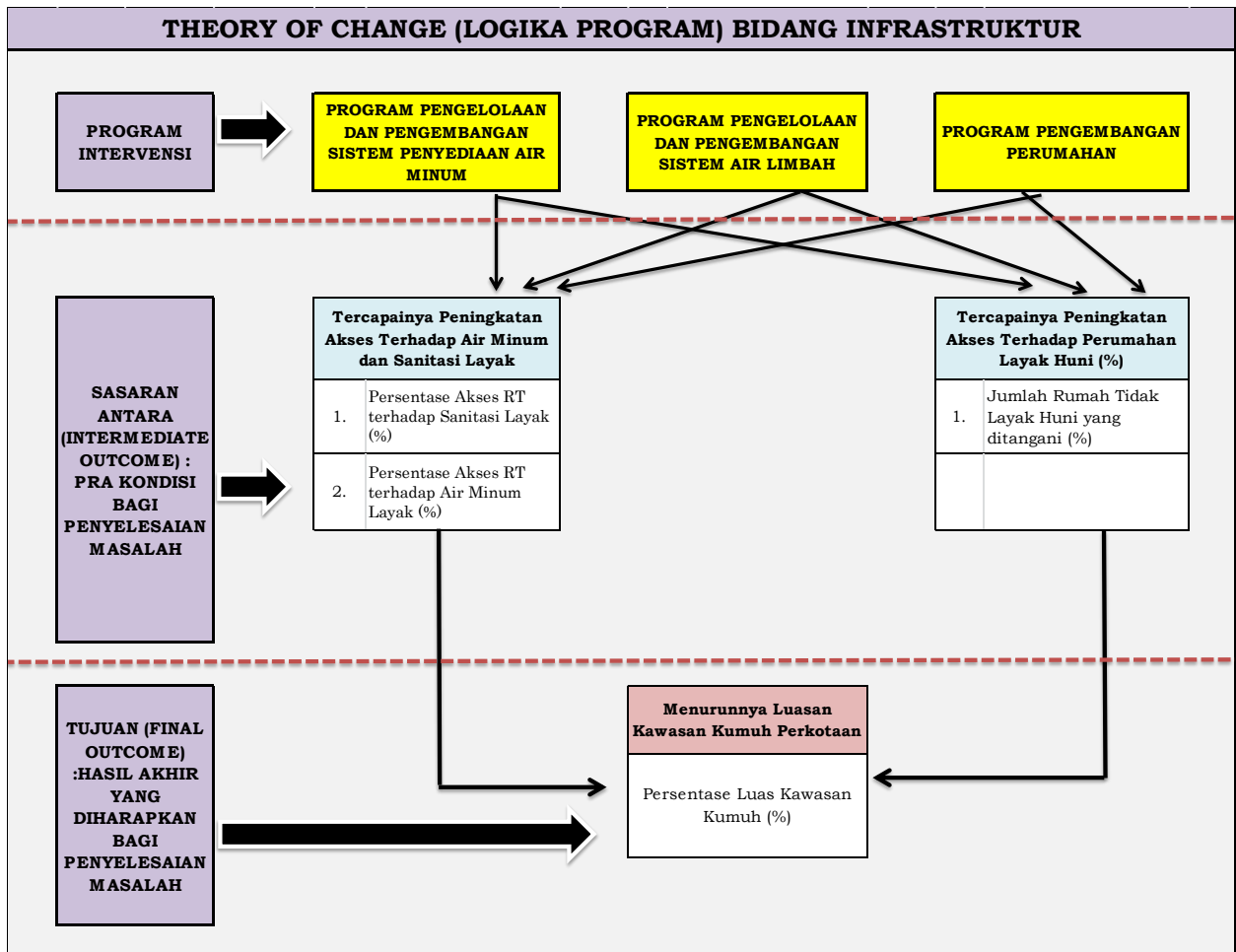
Sumber: Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022

Gambar 4.3. Theory of Change (Logika Program) Bidang Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

C. BIDANG INFRASTRUKTUR

Penyusunan logika program bidang infrastruktur bertujuan untuk memetakan atau mengidentifikasi tujuan /final outcome yang diharapkan ingin dicapai pada sektor kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan memetakan program intervensi apa yang relevan untuk mewujudkan final outcome tersebut.

Berdasarkan gambar 4.2, final outcome atau hasil akhir yang diharapkan bagi penyelesaian masalah bidang infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “ **Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan** ”, dengan indikator keberhasilan yaitu: Persentase Luas Kawasan Kumuh (%). Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. menurut Arawinda Nawagamuwa dan Nils Viking (2003:3-5) penyebab adanya permukiman kumuh adalah karakter bangunan yaitu umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat; karakter lingkungan yaitu tidak ada *open space* (ruang terbuka hijau) dan tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi keluarga, kepadatan penduduk yang tinggi, sarana prasarana yang tidak terencana dengan baik. Permukiman kumuh dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, budaya para penghuni permukiman tersebut. Adapun ciri-ciri kawasan permukiman kumuh dapat tercermin dari, *pertama*, penampilan fisik bangunannya yang makin kontruksi, yaitu banyaknya bangunan-bangunan temporer yang berdiri serta nampak tak terurus maupun tanpa perawatan. *Kedua*, pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi mereka, biasanya masyarakat kawasan kumuh berpenghasilan rendah. *Ketiga*, kepadatan bangunan yang tinggi, dapat terlihat tidak adanya jarak antara bangunan maupun siteplan yang tidak terencana. *Keempat*, kepadatan penduduk tinggi dan masyarakatnya yang heterogen. *Kelima*, sistem sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang baik. *Keenam*, kondisi sosial yang tidak dapat baik dilihat dengan banyaknya tindakan kejahatan maupun kriminal. *Ketujuh*, banyaknya masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewah rumah.



Sumber: Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022

Gambar 4.4. Theory of Change (Logika Program) Bidang Infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.2. ANALISIS KETERKAITAN (CAUSAL ATTRIBUTION)

Sebagai salah satu metode evaluasi dampak (*impact evaluation*) analisis keterkaitan (*causal relationship*) adalah suatu cara membuktikan bahwa perubahan outcome telah terjadi; dan bahwa perubahan itu, setidaknya untuk sebagian, telah disebabkan oleh intervensi terhadap determinan-determinan tertentu.

Analisis keterkaitan dapat memeriksa keberhasilan setiap garis hubungan sebab-akibat yang digambarkan oleh logika program. Sehingga, dari outcome yang terbukti, tau sebaliknya tidak terbukti, berdasar teori perubahan dapat diketahui determinan mana yang perlu harus diintervensi dan mana yang perlu

dikaji ulang strategi penanganannya. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dengan satu atau lebih cara di bawah ini:

1. Causal list inference

Jika diketahui bahwa hasil *outcome/impact* tertentu hampir selalu disebabkan oleh faktor A,B,C atau D; dan dalam kasus yang dianalisis ternyata faktor B,C dan D tidak terjadi, maka dapat diyakini bahwa **A** merupakan faktor penyebab.

2. Modus operandi inference

Teknik ini berguna jika ditemukan lebih dari satu kemungkinan faktor penyebab. Jika diketahui bahwa *Outcome/Impact* tertentu hampir selalu terjadi karena faktor A,B,C atau D, dan dalam kasus yang dianalisis ternyata C dan D tidak terjadi, sehingga determinan mengerucut pada A atau B. Dan selain itu, diketahui pula hanya modus operandi untuk A yang pernah terbukti, maka hampir dapat diyakini bahwa A merupakan faktor penyebab. Terutama jika modus operandi untuk A dan B jelas berbeda satu sama lain.

3. Temporal Precedence (timing of impact)

Pengaruh ditemukan hanya setelah intervensi dilakukan, sebelumnya tidak.

4. Constant conjunction

Pengaruh ditemukan di semua tempat dimana intervensi tertentu diterapkan.

5. Strength of association

Perubahan yang ditemukan lebih kuat terjadi di tempat dimana program dilaksanakan daripada di tempat lain dimana yang ada adalah determinan lain.

6. Biological gradient (*dose response*)

Makin kuat intervensi, makin kuat perubahan yang dihasilkan.

7. Coherence

Keterkaitan antara intervensi dan perubahan yang terjadi cocok secara logika dengan hal lain yang diketahui menyangkut intervensi dan hasilnya.

8. Analogy

Pola keterkaitan antara intervensi dan perubahan yang dihasilkan menyerupai pola keterkaitan yang lazim antara suatu bentuk intervensi dan pengaruhnya.

Analisis keterkaitan (*Causal Attribution*) merupakan analisis keterkaitan antara data capaian indikator tujuan (*long term outcome*) dengan data capaian indikator sasaran (*intermediate outcome*) berdasarkan logika program atau toc (*teory of change*) yang telah disusun. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi kesesuaian/keselarasan jika data capaian indikator sasaran mengalami perubahan (naik/turun) maka berimplikasi terhadap perubahan data capaian indikator tujuan (naik/turun). Analisis keterkaitan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang ada atau tidaknya kaitan antara satu program atau kegiatan terhadap upaya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengukuran kaitan antara program dan kegiatan dengan angka kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator dari masing-masing program dan kegiatan.

Selain itu, perlu disampaikan bahwa agar lebih mudahnya pemahaman terhadap analisis efektivitas dilakukan pula pengelompokkan terhadap program dan kegiatan melalui aspek Pendidikan, aspek Kesehatan dan aspek lingkungan fisik, seperti yang dilakukan pada analisis perkembangan antar waktu dan analisis relevansi sebelumnya.

BAB V

LOKASI PRIORITAS

5.1. IDENTIFIKASI PRIORITAS WILAYAH

Penentuan lokasi prioritas untuk melakukan intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sering menjadi tahapan yang paling krusial. Kesalahan dalam menentukan lokasi penempatan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat menjadi awal kegagalan pencapaian program dan kegiatan di dalam menurunkan angka kemiskinan. Kalau pun program dan kegiatan dapat dijalankan, hasil yang dicapai tidaklah optimal dan bahkan sering terjadi hanya merupakan suatu langkah pemborosan anggaran semata.

Oleh karena itu, penentuan lokasi prioritas hendaknya dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan pada perhitungan ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, penentuan lokasi prioritas dengan pendekatan perhitungan ilmiah dapat mengoptimalkan penggunaan data dan informasi tentang beberapa faktor dan indikator kondisi eksisting dari kemiskinan di suatu daerah.

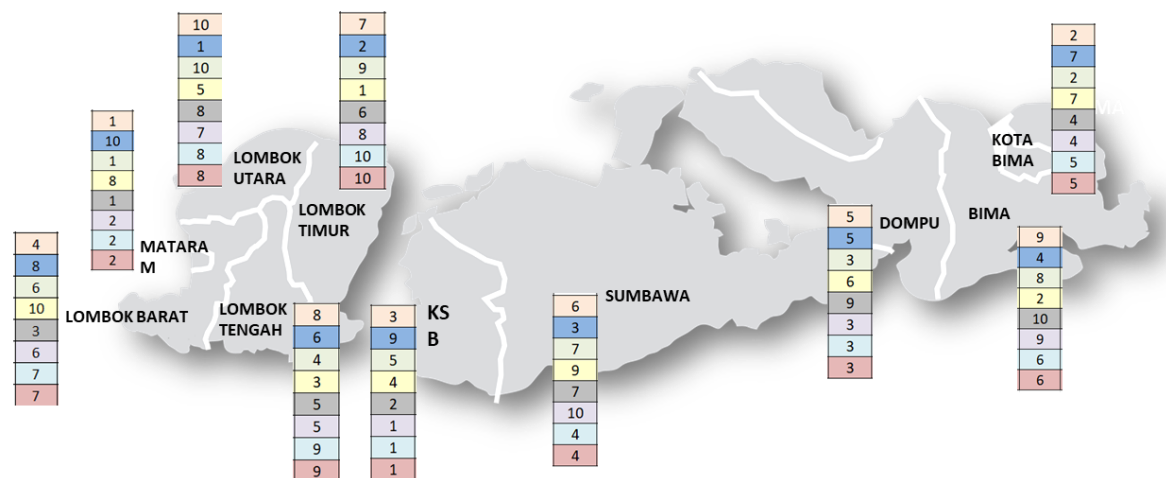
5.1.1. Pemilihan Indikator

Perhitungan penentuan lokasi prioritas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan acuan dari beberapa pencapaian indikator pembangunan yang erat kaitannya dengan kemiskinan. Pencapaian beberapa indikator tersebut secara *de facto* merupakan tanggungjawab perangkat daerah yang ada di level pemerintahan provinsi.

Adapun indikator yang digunakan meliputi 7 (tujuh) indikator makro yang digunakan oleh pemerintah Provinsi NTB dalam mengevaluasi kinerja Pembangunan dalam rangka penyusunan RPJP-D Provinsi NTB Tahun 2025-2045. Ke-delapan indikator tersebut meliputi: IPM (indeks Pembangunan manusia), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Pendudukan Miskin, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi Dengan Tambang dan PDRB ADHB Per Kapita.

5.1.1. Perhitungan Skoring Indikator

Langkah pertama untuk menentukan lokasi prioritas dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan melakukan perankingan secara relatif terhadap posisi pencapaian kinerja untuk masing-masing daerah kabupaten/kota untuk setiap indikator terhadap sepuluh kabupaten/kota di Provinsi NTB. Perankingan dilakukan dengan menggunakan hasil perankingan yang telah dilakukan oleh Bappeda Provinsi NTB dalam rangka penyusunan RPJP-D Provinsi NTB tahun 2025-2045 dengan menggunakan rangking wilayah pada peta sebagai berikut:



KETERANGAN:

IPM Tahun 2022	TPT Tahun 2022	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022	Gini Ratio Tahun 2022
Pengeluaran per Kapita Tahun 2022	Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang Tahun 2022	PDRB ADHK per Kapita	PDRB ADHB per Kapita

Gambar.5.1. Peta Posisi Ranking Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

Sumber: Paparan Kepala Bappeda Provinsi NTB Pada Saat Kick Off Meeting Penyusunan RPJP-D Kota Mataram, 2023.

Setelah menentukan indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan lokasi prioritas, maka langkah selanjutnya melakukan perhitungan skor untuk masing-masing pencapaian indikator untuk masing-masing lokasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Lokasi yang memungkinkan untuk dilakukan perhitungan skor hanya sampai pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini dilakukan

karena terdapat kendala ketersediaan data dan informasi bila perhitungan sampai di tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Dari data dan informasi yang tersedia di tingkat Kabupaten untuk masing-masing indikator sampai tahun data 2021 tersebut kemudian dilakukan pemberian skor pencapaiannya. Skor pencapaian diberikan berdasarkan sifat dari indikator yang bersangkutan. Bila sifat indikatornya negatif atau indikator yang menunjukkan kondisi buruk sebelum diintervensi dengan program dan kegiatan, kemudian menjadi baik setelah adanya program, maka skornya akan diberikan maksimal (10), bila menunjukkan nilai terendah dan sebaliknya akan diberikan skor minimal (1) bila menunjukkan nilai indikator tertinggi. Demikian sebaliknya, bila sifat indikatornya positif atau indikator tersebut akan menunjukkan nilai tinggi atau membaik setelah intervensi program dan menurun atau memburuk setelah adanya program, maka skornya akan diberikan maksimal (10) bila menunjukkan nilai tertinggi dan skor minimal bila menunjukkan nilai terendah (1). Setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan acuan indikator dan cara menentukan skor untuk masing-masing pencapaian indikator untuk masing-masing kabupaten/kota dapat diperoleh hasil seperti diuraikan berikut ini.

Sebelum menentukan skor dilakukan dulu perangkingan terhadap delapan indikator yang digunakan dan telah digambarkan pada peta di atas. Setelah ditabulasi data rangking kinerja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB untuk masing-masing indikator dengan tahun pengamatan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.5.1. Ranking Pencapaian Delapan Indikator Makro Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB, 2022.

No.	Kabupaten/Kota	Ranking						
		TPT	% Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Pengeluaran Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi Tambang	IPM ^{*)}	PDRB ADHB Per Kapita
1	Lombok Barat	8	6	8	3	6	4	7
2	Lombok Tengah	6	4	9	5	5	9	9
3	Lombok Timur	2	9	10	6	8	7,5	10
4	Sumbawa	3	7	6	7	10	6	4
5	Dompu	5	3	3	9	3	5	3
6	Bima	4	8	7	10	9	7,5	6
7	Sumbawa Barat	9	5	2	2	1	3	1
8	Lombok Utara	1	10	5	8	7	10	8
9	Kota Mataram	10	1	4	1	2	1	2
10	Kota Bima	7	2	1	4	4	2	5

Keterangan: *) Bila ada yang memiliki angka yang sama diberikan ranking rata-rata. Misal pada Angka IPM Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Dompu memiliki nilai IPM yang sama 66,66.

Sumber: Bappeda Provinsi NTB Diolah, 2023.

5.2. Perhitungan Skor Penentuan Lokasi Prioritas Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi NTB

Berdasarkan data ranking pada tabel.5.1 tersebut kemudian dilakukan pemberian skor dengan ketentuan, kabupaten kota yang memiliki ranking terbaik (1) akan mendapatkan skor maksimum (10). Dan sebaliknya kabupaten/kota dengan ranking terendah (10) akan memperoleh skor terendah (1). Dari hasil perhitungan berdasarkan ketentuan tersebut dapat diperoleh skor untuk masing-masing indikator oleh masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel.5.2. Skor Berdasarkan Ranking Pencapaian Delapan Indikator Makro Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB, 2022.

No.	Kabupaten/Kota	Skor Berdasarkan Ranking							Total Skor	Ranking Akhir
		TPT	Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Pengeluaran Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi Tambang	IPM	PDRB ADHB Per Kapita		
1	Lombok Barat	3	5	3	8	5	7	4	35	V
2	Lombok Tengah	5	7	2	6	6	2	2	30	VII
3	Lombok Timur	9	2	1	5	3	3,5	1	24,5	X
4	Sumbawa	8	4	5	4	1	5	7	34	VI
5	Dompu	6	8	8	2	8	6	8	46	IV
6	Bima	7	3	4	1	2	3,5	5	25,5	IX
7	Sumbawa Barat	2	6	9	9	10	8	10	54	II
8	Lombok Utara	10	1	6	3	4	1	3	28	VIII
9	Kota Mataram	1	10	7	10	9	9	9	55	I
10	Kota Bima	4	9	10	7	7	10	6	53	III
Total Skor		55	55	55	55	55	55	55		

Sumber: Data Tabel 5.1 Diolah, 2023.

Berdasarkan hasil pemberian skor terhadap ranking pencapaian delapan indikator diperoleh skor total untuk masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki skor rendah merupakan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB. Pada tabel 5.2 diperlihatkan ada 4 (empat) kabupaten yang menduduki posisi terendah menurut pencapaian delapan indikator makro Pembangunan di Provinsi NTB yaitu Kabupaten Lombok Tengah (Posisi VII), Kabupaten Lombok Utara (Posisi VIII) dan Kabupaten Lombok Bima (Posisi IX) dan Kabupaten Lombok Timur (Posisi X). Ke-empat kabupaten tersebut dapat menjadi wilayah intervensi utama atau prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB untuk masa mendatang.

5.3. Penentuan Modus Intervensi

Dalam menentukan modus intervensi adalah dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah, *best practices* program penanggulangan kemiskinan daerah lain, dan karakteristik wilayah intervensi. Pada bagian berikut dapat disampaikan beberapa modus intervensi penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB 2021-2026 sebagai berikut:

a. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga (*Family-Base Policy*) Rumah Tangga Miskin

Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin menurut individu (sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga miskin). Pemanfaat dari pelaksanaan strategi ini adalah anggota keluarga yang berasal dari rumah tangga yang termasuk kategori miskin atau dekat miskin. Pemanfaat dari pelaksanaan strategi ini diperoleh melalui proses verifikasi data rumah tangga miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB dibantu tenaga fasilitator dari kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan. Sesuai fokus kondisi kekinian dari Pemerintah Provinsi NTB, maka Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi NTB Berbasis Rumah Tangga Miskin yang dikenal pula dengan pendekatan *Family Centered Integrated Social Assistance* ini akan mencakup penyediaan beberapa bantuan sosial yang akan diberikan kepada keluarga miskin (sebagai *benefits*) sebagai berikut:

Pertama, Bantuan langsung kepada keluarga sasaran. Bantuan langsung dapat berupa bantuan langsung tunai bersyarat (*conditional cash transfer*), bantuan langsung tunai tanpa syarat (*unconditional cash transfer*), bantuan langsung dalam bentuk *inkind*, seperti pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya. Penyediaan bantuan ini akan melengkapi prioritas Pemerintah Pusat sehingga dampaknya bagi rumah tangga miskin penerima manfaat strategi akan semakin diperkuat.

Kedua, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini. Bantuan ini diberikan kepada anggota keluarga rumah tangga miskin yang masih berusia sekolah melalui pemberian uang tunai kepada keluarga yang berasal dari rumah tangga miskin, dimana sebagai imbalannya keluarga penerima diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai dengan ketentuan. Termasuk dalam strategi ini memberikan insentif bagi kepala keluarga rumah tangga miskin untuk

memasukkan anak-anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah, seperti pekerja anak, untuk kembali ke bangku sekolah.

Ketiga, bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatan dan gizi (*parenting education*) melalui pemberi pelayanan kesehatan yang ditunjuk. Bantuan ini diberikan kepada ibu-ibu hamil atau yang sedang mengasuh anak balita dalam rumah tangga miskin dengan syarat ibu-ibu hamil atau yang sedang mengasuh anak balita tersebut memeriksakan kesehatan mereka atau anak balita mereka ke Puskesmas.

Keempat, bantuan tunai untuk penanggulangan pengangguran sementara (*cash for work*). Bantuan ini disediakan bagi anggota keluarga rumah tangga miskin yang sudah berusia antara 15-24 tahun namun masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Mereka akan diberikan modal kerja sementara untuk mempersiapkan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Selain itu, mereka juga akan diberikan pelatihan peningkatan kompetensi.

Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (*family centered integrated social assistance*) merupakan perwujudan fokus prioritas bidang penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga. Bidang ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Bantuan Langsung kepada keluarga sasaran. Bantuan langsung dapat berupa bantuan langsung tunai bersyarat (*conditional cash transfer*), bantuan langsung tunai tanpa syarat (*unconditional cash transfer*), bantuan langsung dalam bentuk barang (*in kind*), misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (*raskin*), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya. Kegiatan ini menjadi tanggung-jawab perangkat daerah urusan sosial dan tenaga kerja;
- Kegiatan bantuan pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan berupa beasiswa, kegiatan pengembangan fasilitas operasional sekolah dan kegiatan pengembangan SDM untuk guru. Kegiatan ini menjadi tanggung-jawab perangkat daerah urusan Pendidikan;

- Kegiatan bantuan kesehatan dapat berupa bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatandan gizi (*parenting education*) melalui pemberi pelayanan kesehatan yang ditunjuk, misalkan pelayanan kesehatan dasar, perawatan kesehatan bagi ibu hamil dan balitadan jaminan kesehatan untuk rawat inap. Kegiatan ini menjadi tanggung-jawab perangkat daerah urusan Kesehatan rumah sakit; dan
- Kegiatan bantuan tunai untuk penanggulangan pengangguran berupa bantuan tunai untuk penanggulangan pengangguran sementara yang diberikan kepada kelompok rumah tangga miskin. Bantuan ini termasuk dalam kegiatan pemberian pelatihan peningkatan kompetensi usia produktif serta pemberian bantuan modal kerja pasca pelatihan. Kegiatan ini menjadi tanggung-jawab perangkat daerah urusan sosial, tenaga kerja dan koperasi dan UMKM.

b. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas (Pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga Miskin)

Strategi ini bertujuan membiasakan para rumah tangga miskin untuk berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk solidaritas sosial, dan meningkatkan peran serta aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) sampai dengan tingkat lingkungan untuk berperan dalam meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana dan prasarana sosial dasar. Strategi ini sekaligus akan memperkuat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat khususnya pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi NTB.

Pemberdayaan secara prinsip adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya agar memiliki kekuatan untuk aktualisasi diri. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat lepas begitu saja, namun merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat disini

dimaksudkan agar masyarakat mampu menyuarakan aspirasi mereka dan mampu dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik yang berorientasi terhadap masyarakat miskin. Selain itu dengan adanya partisipasi masyarakat akan dapat meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat sebagai landasan bagi pendidikan demokrasi serta akan dapat memperkuat solidaritas komunitas masyarakat lokal.

Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas melalui pemberdayaan kelompok masyarakat merupakan perwujudan fokus prioritas bidang penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Bidang ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan pemberdayaan komunitas masyarakat di tingkat kelurahan bersasaran kelompok rumah tangga miskin (sebagai kegiatan pendamping dari Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh institusi vertikal. Kegiatan ini menjadi tanggung-jawab perangkat daerah urusan perencanaan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Individu Terpilih Sebagai Pemicu Pencapaian Peningkatan Pendapatan bagi Kelompok Rumah Tangga Miskin Produktif

Strategi berikutnya adalah penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin yang ada di antara para anggotanya yang produktif dan mempunyai usaha mikro dan kecil. Sehingga mereka dapat meningkatkan akses mereka kepada permodalan, teknologi dan pasar, sehingga peningkatan pendapatan dapat lebih besar lagi. Strategi ini menyediakan bantuan modal atau kredit mikro kepada kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam satu satuan wilayah terkecil seperti RT atau RW. Strategi ini sekaligus akan memperkuat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Individu Terpilih

Sebagai Pemicu Pencapaian Peningkatan Pendapatan bagi Kelompok Rumah Tangga Miskin Produktif di Provinsi NTB ini akan bersinergi dengan program KUR sehingga diharapkan akan berlangsung akselerasi/percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan keluarga miskin.

Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan merupakan perwujudan fokus prioritas bidang penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Bidang ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan bantuan modal kerja atau penyediaan kredit usaha bersama bagi kelompok rumah tangga miskin (sebagai pendamping dari program Kredit Usaha Rakyat Departemen Koperasi dan UKM Republik Indonesia). Kegiatan ini menjadi tanggung-jawab perangkat daerah urusan koperasi dan UMKM.

d. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Spasial Dan Fisik Infrastruktur Sebagai Pemicu Pencapaian Peningkatan Kualitas Lingkungan Wilayah Perkotaan Produktif

Strategi penting lainnya adalah penanggulangan kemiskinan berbasis Berbasis Spasial Dan Fisik Infrastruktur Sebagai Pemicu Pencapaian Peningkatan Kualitas Lingkungan Wilayah Perkotaan Produktif. Strategi ini ditujukan untuk memberikan peluang yang besar kepada wilayah kota dengan tingkat produktivitas wilayah dan masyarakatnya tinggi untuk dapat memperoleh perhatian lebih untuk mendapatkan dukungan infrastruktur penunjang perekonomian. Sehingga masyarakat wilayah tersebut dapat lebih cepat untuk mengembangkan potensi ekonomi serta dapat dijadikan sebagai katalisator wilayah sekitarnya. Strategi ini menyediakan dukungan sarana dan prasarana penunjang perekonomian, perbaikan lingkungan perumahan dan permukiman serta bantuan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat (penyediaan lapak modern, higienis dan artistik).

5.4. MATRIK PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sub bab ini memuat program prioritas dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB. Program yang dirumuskan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2022-2026 beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Formulasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan didasarkan pada analisis teori perubahan (*theory of change*), analisis keterkaitan (*causal attribution*), analisis kapasitas fiskal dan analisa modus intervensi berdasarkan permasalahan kemiskinan yang dialami oleh masing-masing kecamatan yang diamati dari berbagai dimensi yaitu dimensi sosial, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dirumuskan juga telah dilakukan penyesuaian dengan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Uraian tentang hubungan antara urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dalam menjawab kinerja pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan menjadi jabaran pada bagian ini. Selain itu juga disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Setelah program prioritas diketahui, kemudian ditentukan alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan perkiraan harga oleh Perangkat Daerah.

Tabel 5.10 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2022-2026

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp Jutaan)					Sumber Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	904,31	585.441,83	620.531,84	798.249,54	760.214,53	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum	Cakupan air Minum	%	3.519,00	1.829,06	1.016,68	1.037,01	1.057,75	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Pengeloaalam dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase RT Dengan Akses Sanitasi Layak	%	-	691,00	708,24	722,40	736,85	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Informasi Harga dan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	720,00	891,26	923,76	942,24	961,08	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Off Undernourishment	%	362,50	100,00	103,45	105,52	107,63	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
7	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	27.893,50	38.171,29	38.139,62	34.302,03	35.172,69	APBD	BRIDA
8	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase PD Yang Menerapkan PPRG	%	150,00	589,79	595,47	607,38	619,53	APBD	DP3AKB

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp Jutaan)					Sumber Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perempuan Rentan Yang Bekerja	%	-	7,30	101,40	103,43	105,49	APBD	DP3AKB
10	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Tertangani	%	4.561,33	13.689,10	11.009,43	21.229,62	21.454,21	APBD	Dinas Sosial
11	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	7.511,40	20.261,54	16.235,67	16.560,38	16.891,59	APBD	Dinas Sosial
14	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	%	-	15.468,24	13.738,30	11.820,98	12.057,40	APBD	Dinas Sosial
15	Program Penanganan Bencana Daerah Provinsi	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	-	1.175,20	1.329,49	1.356,08	1.383,20	APBD	Dinas Sosial
16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Penurunan Kasus kematian Ibu 20%, Kematian anak 5% Pertahun	%	98.282,87	117.059,52	97.682,67	1.444.357,18	164.537,42	APBD	Dinas Kesehatan
17	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) Yang Tertangani	%	1.820,00	4.933,25	4.017,83	4.238,81	4.471,95	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp Jutaan)					Sumber Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Kumuh Yang Ditangani	%	206.333,63	401.664,62	227.558,00	272.709,71	300.188,70	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman
19	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Terbentuknya Destana dan SMAB	%	-	916,91	365,97	373,29	380,76	APBD	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah
20	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Listrik (Rumah Tangga)	RT	587,39	170,90	199,35	203,33	207,40	APBD	Dinas ESDM
21	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola Secara Berkelanjutan	%	3.305,50	4.609,36	3.863,61	3.840,88	3.917,70	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
22	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3.101,01	24.536,62	22.819,37	20.490,08	20.899,86	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	524,60	4.328,35	4.780,61	4.876,22	4.973,74	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
24	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	-	199,18	236,76	241,50	246,33	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
25	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Populasi Ternak Sapi, Kambing, Kerbau dan Unggas	Ekor	25.097,09	39.935,73	21.820,32	19.973,92	20.373,40	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp Jutaan)					Sumber Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat Pemanfaatan Prasarana Pertanian	%	-	30,00	33,17	33,83	34,05	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
27	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat kematian ternak Akibat PMHS	%	300,00	1.286,87	1.406,53	1.434,66	1.463,35	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
30	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Memiliki Perangkat Hubungan Industrial	%	672,00	1.331,01	1.406,85	1.234,98	1.259,68	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja/Pekerja Yang Bersertifikat Kopetensi	%	1.340,82	628,28	772,70	688,16	701,92	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
33	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	3.824,70	339,38	349,03	356,01	363,13	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	%	44,82	18,96	20,56	20,97	21,39	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
35	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun	%	-	19,08	19,32	19,70	20,10	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
38	Program Pengembnagan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	-	3.930,17	4.399,84	4.487,84	4.577,60	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp Jutaan)					Sumber Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			38,60	-	-	-	-	APBD	DP3AKB
40	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	Laporan	6.546,50	6.698,08	6.023,56	5.644,04	5.756,92	APBD	Dinas Perindustrian
41	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Yang Ditingkatkan Volume Unit Usahanya	Unit Usaha	900,00	1.350,00	1.453,13	1.482,19	1.511,83	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM
42	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Yang Ditingkatkan Volume Usahanya	Unit Usaha	450,00	550,00	641,61	654,44	667,53	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM Yang Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Unit Usaha	2.739,50	410,46	426,82	435,35	444,06	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM
44	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM Yang Berwirausaha	Unit Usaha	-	754,24	783,94	799,62	815,61	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM
45	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	6.643,00	3.993,50	3.180,25	3.043,85	3.104,73	APBD	Dinas Perdagangan
46	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian sengketa	%	1.705,95	1.485,54	1.503,96	1.334,04	1.360,73	APBD	Dinas Perdagangan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp Jutaan)					Sumber Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	1.189,50	6.052,50	5.236,07	4.941,62	5.040,46	APBD	Dinas Perdagangan
48	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	55,00	740,50	859,73	876,92	894,46	APBD	Dinas Perdagangan
49	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	129,60	300,01	355,19	362,30	369,54	APBD	Dinas Perdagangan
50	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kesejahteraan Dari Segi Mental Spiritual Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	1.049,53	76.245,00	73.792,19	67.589,10	69.960,95	APBD	BIRO KESRA
51	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Desa Wisata Yang Dikembangkan	%	2.320,03	6.187,15	6.164,76	5.288,06	5.393,82	APBD	Dinas Pariwisata
52	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Penunjang Layanan Pariwisata Yang Memenuhi Standar	%	36,95	114,42	120,55	1.229,63	125,42	APBD	Dinas Pariwisata
53	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase BUMDES Aktif	%	892,00	2.018,00	2.068,06	2.109,42	2.151,61	APBD	Dinas BPMPDESDUKCAPIL

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp Jutaan)					Sumber Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%	16.981,56	20.913,74	11.297,75	8.523,71	8.124,70	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
55	Program Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%	58.045,95	130.000,61	79.913,40	78.179,49	79.743,08	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
56	Program Penyuluhan Pertanian	SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	-	584,02	656,76	669,90	683,30	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
57	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	%	2.056,00	6.632,30	6.645,84	6.078,76	6.200,34	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
58	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Pengelolaan DAS Yang Dioptimalkan	%	10.702,71	150,00	166,95	170,29	173,69	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
59	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Kelompok Tani Hutan Yang Meningkatkan Kelasnya	%	350,40	493,00	166,95	170,29	173,69	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Kawasan Hutan Yang Dikelola	%	35.796,27	6.751,30	6.652,43	5.785,48	5.901,19	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				39.485,53	1.556.678,14	1.304.295,72	2.861.986,16	1.577.998,06		

BAB VI

P E N U T U P

Penghargaan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mensyaratkan adanya kehendak politik yang kuat dari negara. Penanggulangan kemiskinan selain membutuhkan ketersediaan sumberdaya juga menuntut adanya perbaikan dalam pengelolaan pembangunan daerah dengan mengalihkan pengeluaran yang tidak produktif dan memperbesar pengeluaran yang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat.

Sudah bukan waktunya lagi bagi setiap perangkat daerah untuk mengemukakan ego sektoralnya. Azas dekonsentrasi dan desentralisasi sebagaimana tertuang dalam UU No 23 Tahun 2014 memberikan peluang yang sangat luas bagi setiap daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan sinergitas dan efektifitas setiap program pembangunan di daerah masing-masing, termasuk dalam rangka mempercepat proses pengentasan kemiskinan.

Salah satu kekurangan yang harus diakui dalam dokumen ini adalah tidak adanya informasi yang jelas berhubungan dengan sebaran posisi dan potensi kemiskinan. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini belum dapat sepenuhnya memanfaatkan hasil pendataan dan penyusunan peta kemiskinan yang akurat dan *up to date* untuk dijadikan rona awal bagi melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sungguhpun demikian berbagai data dari BPS dan data sektoral lainnya yang diungkap pada bagian awal RPKD Provinsi Nusa Tenggara Barat ini hendaknya dapat membantu untuk memahami kondisi umum tentang kemiskinan yang terjadi dan sedang berlangsung di kota kita tercinta ini. Pada waktunya dan sekiranya dana memungkinkan memang tidak pernah terlambat apabila di setiap kecamatan dilakukan *up-dating* data dan disertai dengan penyusunan data base kemiskinan di kecamatan masing-masing. Dengan pemetaan seperti itu, akan dapat diketahui peta dan sebaran lokasi serta potensi wilayah yang kiranya dapat dikembangkan sebagai solusi terdekat dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah setempat.

Sebagai penutup kami perlu menegaskan bahwa RPKD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022-2026 ini bersifat dinamis dalam arti bahwa apa yang tertera di dalam dokumen ini

dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan dan dana yang tersedia. Sebagai dokumen tingkat kota, diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan tingkat RT untuk menyusun rencana program dan kegiatan di wilayah masing-masing. Dengan adanya pedoman ini diharapkan setiap perangkat daerah dan wilayah administratif di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menyesuaikan diri di dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Penjabaran dan penajaman program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada kajian akademik tentang analisis relevansi, efisiensi dan penentuan lokasi prioritas menjadi paradigma baru bagi para stakeholders dalam melaksanakan programnya tentu akan sangat tergantung dari situasi dan kondisi setempat. Termasuk didalamnya adalah ketika menentukan skala prioritas dan program utama yang nantinya diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ruh dari semua strategi yang dicanangkan adalah adanya *good will* dan *political will* dari setiap unsur aparat pemerintah dan pelaksana pembangunan lainnya di dalam mengemban amanah rakyat. Tanpa dibarengi oleh kemauan baik dan kebijakan politik yang berpihak pada rakyat miskin (*pro poor program*) maka amatlah sulit untuk terpenuhinya target penurunan angka kemiskinan yang ada ketika RKPD ini disusun, seperti yang dicanangkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).